



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH  
KOTA MEDAN  
2023**

**#KOLABORASI  
MEDAN BERKAH**



## KATA PENGANTAR

Sebagai hambanya-Nya, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan tuntunan dan karuniaNya, saat ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2022 dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tepat pada waktunya.

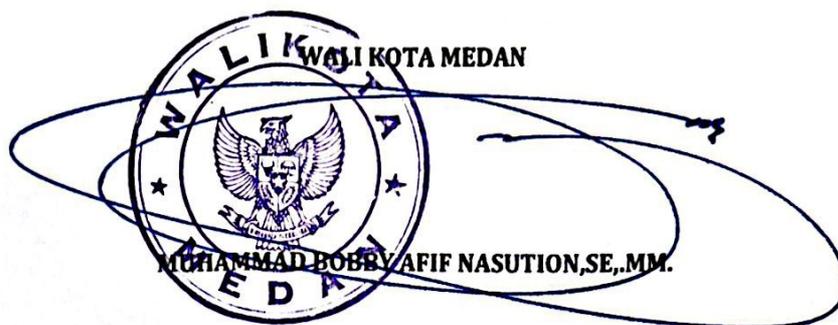
Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ini menyajikan; (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup; (i) capaian kinerja makro; (ii) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (iii) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal selama tahun 2022.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kota, juga masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang sepenuhnya belum dapat diatasi sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat lebih memupuk komitmen pemangku kepentingan pembangunan kota dan secara khusus keseluruhan aparatur Pemerintah kota untuk lebih bekerja keras dalam membangun Kota guna *"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif"*

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses pembangunan kota selama ini, atas nama Pemerintah Kota Medan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin.

Terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	I - 2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I - 2
b. Data Geografis Wilayah.....	I - 4
c. Jumlah Penduduk.....	I -11
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I - 14
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I -15
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I - 17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I - 27
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I - 27
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I - 28
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I - 30
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I - 33
1.1.3 Penetapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-166
a. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-166
b. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	I-167
c. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2021.....	I-169
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II - 1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	II - 2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II - 2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-49

2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-60
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-62
2.3.1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	II-63
2.3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II-64
2.3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II-66
2.3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	II-67
2.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	II-68
2.3.6	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	II-74
<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>III - 1</b>
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III - 1
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan.....	III - 2
3.2.1	Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Memberikan Penugasan.....	III - 2
3.2.2	Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantuan.....	III - 2
3.2.3	Jumlah Kegiatan.....	III - 2
3.2.4	Anggaran Tugas Pembantuan.....	III - 4
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 6
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Medan.....	III - 7
3.3.2	Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah.....	III-25
3.3	Permasalahan dan Kendala.....	III-29
3.4	Saran dan Tindak Lanjut.....	III-29
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV - 1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 1
4.1.2	Minimal Oleh Daerah.....	IV - 1
4.1.3	Alokasi Anggaran.....	IV - 2
4.1.4	Dukungan Personil.....	IV - 9
4.1.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-10
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-10

4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-10
4.2.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV-11
4.2.3	Alokasi Anggaran.....	IV-11
4.2.4	Dukungan Personil.....	IV-12
4.2.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-13
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-14
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-14
4.3.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV-14
4.3.3	Alokasi Anggaran.....	IV-14
4.3.4	Dukungan Personil.....	IV-15
4.3.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-16
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-16
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-16
4.4.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV-17
4.4.3	Alokasi Anggaran.....	IV-17
4.4.4	Dukungan Personil.....	IV-17
4.4.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-18
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV - 19
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV - 19
4.5.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV-19
4.5.3	Alokasi Anggaran.....	IV-20
4.5.4	Dukungan Personil.....	IV-21
4.5.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-21
4.6	Urusan Sosial.....	IV-23
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-23
4.6.2	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV-23
4.6.3	Alokasi Anggaran.....	IV-23
4.6.4	Dukungan Personil.....	IV-24
4.6.5	Permasalahan dan Solusi.....	IV-24

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>
--------------	---------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
Tabel 1.1.	Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya.....	I - 9
Tabel 1.2.	Persentase Kota Medan dalam DAS (%).....	I - 10
Tabel 1.3.	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2020-2022.....	I - 12
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2022.....	I - 13
Tabel 1.5.	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan .....	I - 15
Tabel 1.6.	Unit Kerja Perangkat daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.....	I - 16
Tabel 1.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (rupiah).....	I - 18
Tabel 1.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Rupiah).....	I - 24
Tabel 1.9.	Tujuan, Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	I - 30
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2021-2022.....	II - 1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran ( <i>Output</i> ) Kota Medan Tahun 2022.....	II - 2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> ) Kota Medan Tahun 2022.....	II-50
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2022.....	II- 61
Tabel 2.5.	Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2022.....	II- 63
Tabel 2.6.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2022.....	II- 65
Tabel 2.7.	Pengukuran Kinerja Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II- 66
Tabel 2.8.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	II- 67
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022 (Rupiah).....	II- 69
Tabel 2.10.	Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	II- 74
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022.	III - 7
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022	III-11
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari BKKBN	III-12

	Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022.....	
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022.....	III-21
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022.....	III-25
Tabel 4.1.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	IV--1
Tabel 4.2.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan ....	IV--2
Tabel 4.3.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan .....	IV-10
Tabel 4.4.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan .....	IV-10
Tabel 4.5.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan (Rp).....	IV-11
Tabel 4.6.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan.....	IV-12
Tabel 4.7.	Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan.....	IV-13
Tabel 4.8.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-13
Tabel 4.9.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-14
Tabel 4.10.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-15
Tabel 4.11.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-16
Tabel 4.12.	Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-16
Tabel 4.13.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-17
Tabel 4.14.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-17
Tabel 4.15.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-18
Tabel 4.16.	Personil/Pegawai Sesuai Jabatan Urusan Perumahan Rakyat....	IV-18
Tabel 4.17.	Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-18
Tabel 4.18.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-19
Tabel 4.19.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Rp).....	IV-20
Tabel 4.20.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-21
Tabel 4.21.	Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-22
Tabel 4.22.	Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-23

	Urusan Sosial.....	
Tabel 4.23.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	IV-23
Tabel 4.24.	Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial.....	IV-24
Tabel 4.25.	Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial.....	IV-24

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
Gambar 1.1.	Peta Kota Medan.....	I - 5
Gambar 1.2.	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan.....	I - 6
Gambar 1.3.	Peta Geologi Kota Medan.....	I - 7
Gambar 1.4.	Peta Hidrogeologi Kota Medan.....	I - 9
Gambar 1.5.	Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut.....	I-10
Gambar 1.6.	Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2020-2022.....	I-12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam Pasal 1 dikemukakan bahwa Medan, dengan nama Kota Besar Medan, memiliki batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Medan" dahulu (Staatsblad 1938 No. 715) termaksud dalam Staatsblad 1921 No. 772 setelah diubah dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tanggal 14 November 1951 No. 66/III/PSU. Selanjutnya Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669.

Selanjutnya kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis Kota Medan saat ini dan masa yang akan datang tentunya tidak terlepas dari dimensi historis yang cukup panjang, dimulai dari dibangunnya kawasan Kampung Medan Puteri pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus dan berkembang menjadi Kesultanan Deli tahun 1669. Perkembangan Kota Medan ditandai dengan perpindahan ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan tahun 1887, dan akhirnya tahun 1915 statusnya diubah menjadi Gubernurnemen yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Berdasarkan pertimbangan dinamika dan prospek pembangunan kota secara regional pada masa yang akan datang, maka, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 Tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas wilayah Kota Medan menjadi 5.130 Ha yang meliputi 4 (empat) Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan tersebut dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951 agar wilayah Kota Medan diperluas menjadi 3 (tiga) kali lipat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kodya Medan, Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Kemudian, melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD Tanggal 5 Mei 1986, dengan luas administrasi yang sama, dilakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 Tanggal 30 September 1996 Tentang Pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II, Medan dimekarkan kembali menjadi 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan dan 2.001 Lingkungan Struktur administratif Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi landasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai saat ini. Pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut tentunya dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum yang diselenggarakan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan besar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diharapkan agar dapat segera terwujud nyata. Sesuai amanat Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas-tugas perintahan umum lainnya. Lebih lanjut bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 11 ayat (2), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### **1.1.1. Penjelasan Umum.**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Peraturan perundang - undangan yang mendasari pembentukan daerah dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah, berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  - 12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7) Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 4);
- 21) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2006–2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
- 22) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
- 23) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);
- 24) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
- 25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 1);
- 26) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

## **b. Data Geografis Wilayah**

### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

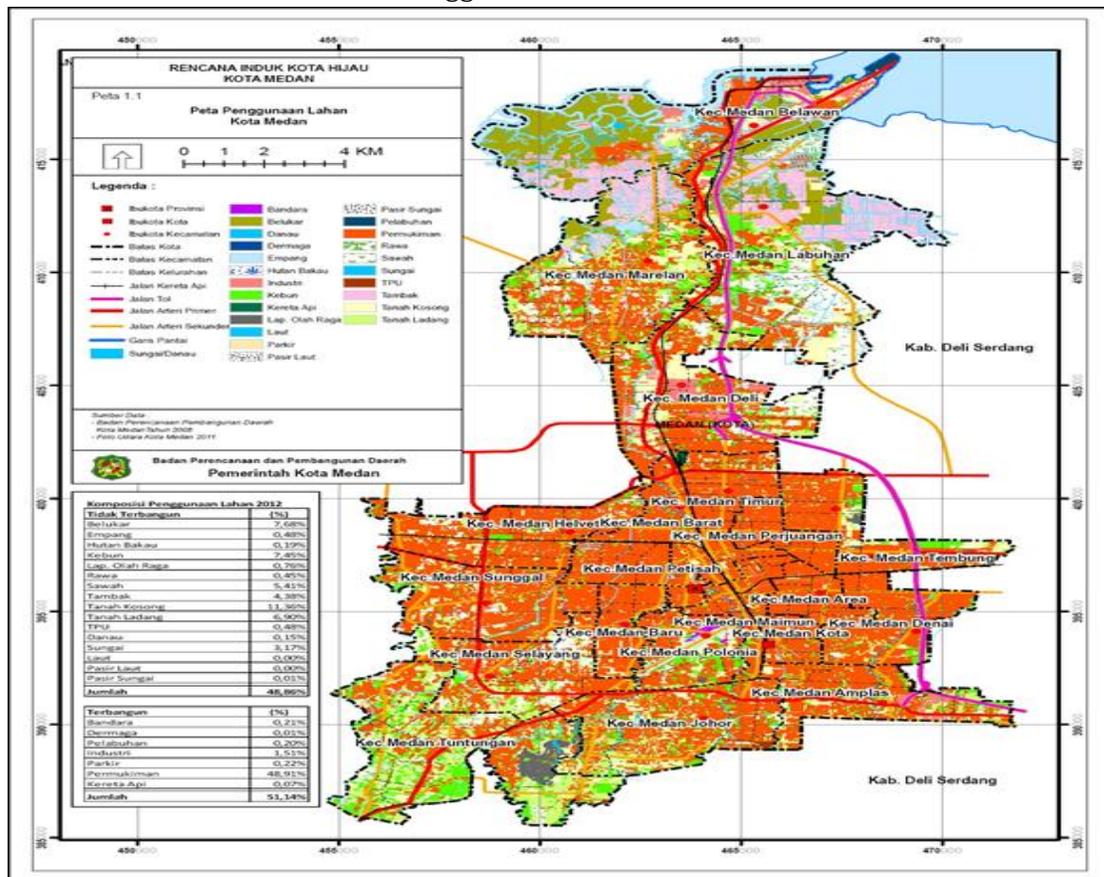
Secara geografis Kota Medan terletak diantara koordinat 3° 27'-3° 47' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Kota Medan terletak di posisi pantai Timur Sumatera Utara yang bagian Utara merupakan daerah pesisir. Dengan demikian, Kota Medan termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat



kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Gambar 1.2.  
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan



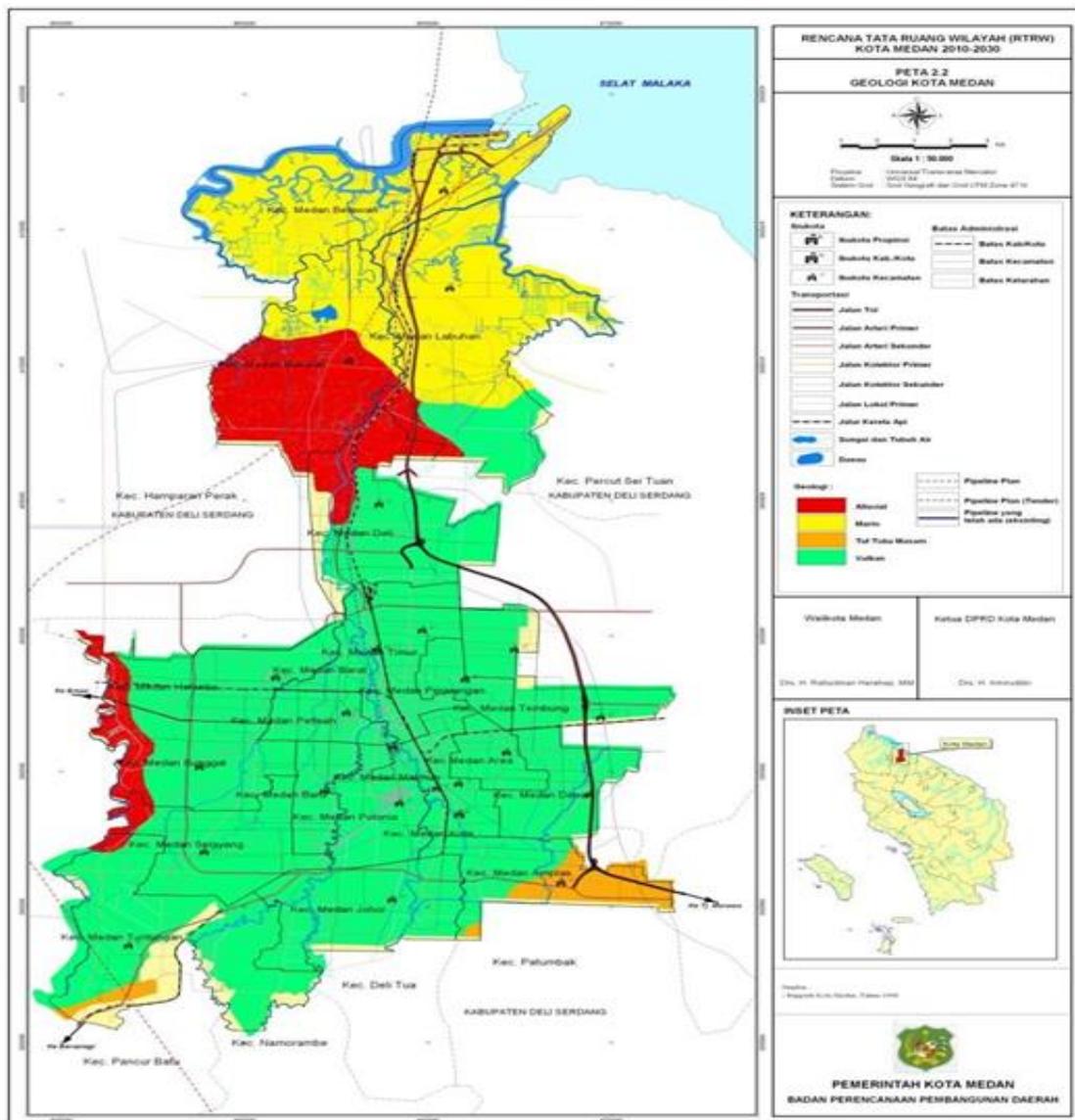
### 3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini :

## 1. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

Gambar 1.3.  
Peta Geologi Kota Medan



#### 1. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda). Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (*unripe*) dan setengah matang (*halfripe*). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai

#### 2. Grup Vulkan

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuartar dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal kearah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang kearah Kabanjahe.

#### 3. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.

#### 4. Air Tanah

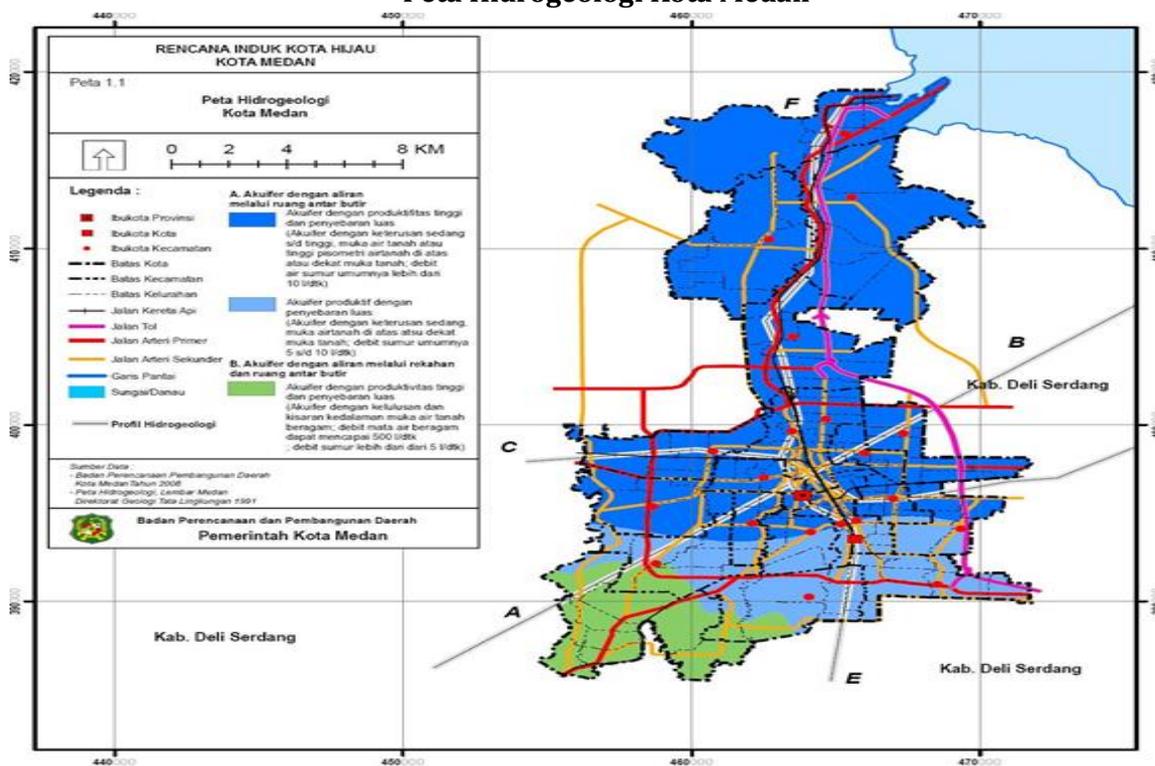
Data tentang air tanah yang ada sangat terbatas, dalam studi yang dilaksanakan oleh C. Lotti & Association Consulting Engineer, kawasan Medan dan sekitarnya dapat dibagi dalam tiga klasifikasi mengenai existing kandungan air tanahnya yang disebut zona. Secara detail dapat dilihat dalam peta *Ground Water Recharge*, yaitu terdiri dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi daerah kawasan pantai, dengan koefisien rechargenya 0,15, zona 2 Medan formasi dengan lapisan *permeable sand over clay* dengan koefisien rechargenya 0,25, kawasan vulkan dengan koefisien

recharge 0,2. *Ground Water Recharge* tersebut menurut zona tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut

**Tabel 1.1.**  
**Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya**

Zona	A(km <sup>2</sup> )	Mar (m/y)	C	Ground Water In / l/s/km <sup>2</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Zona I</b>	<b>761</b>	<b>1,50</b>	<b>0,15</b>	<b>7,1</b>
<b>Zona 2</b>	<b>616</b>	<b>1,75</b>	<b>0,25</b>	<b>13,8</b>
<b>Zona 3</b>	<b>464</b>	<b>2,50</b>	<b>0,20</b>	<b>15,9</b>

**Gambar 1.4.**  
**Peta Hidrogeologi Kota Medan**

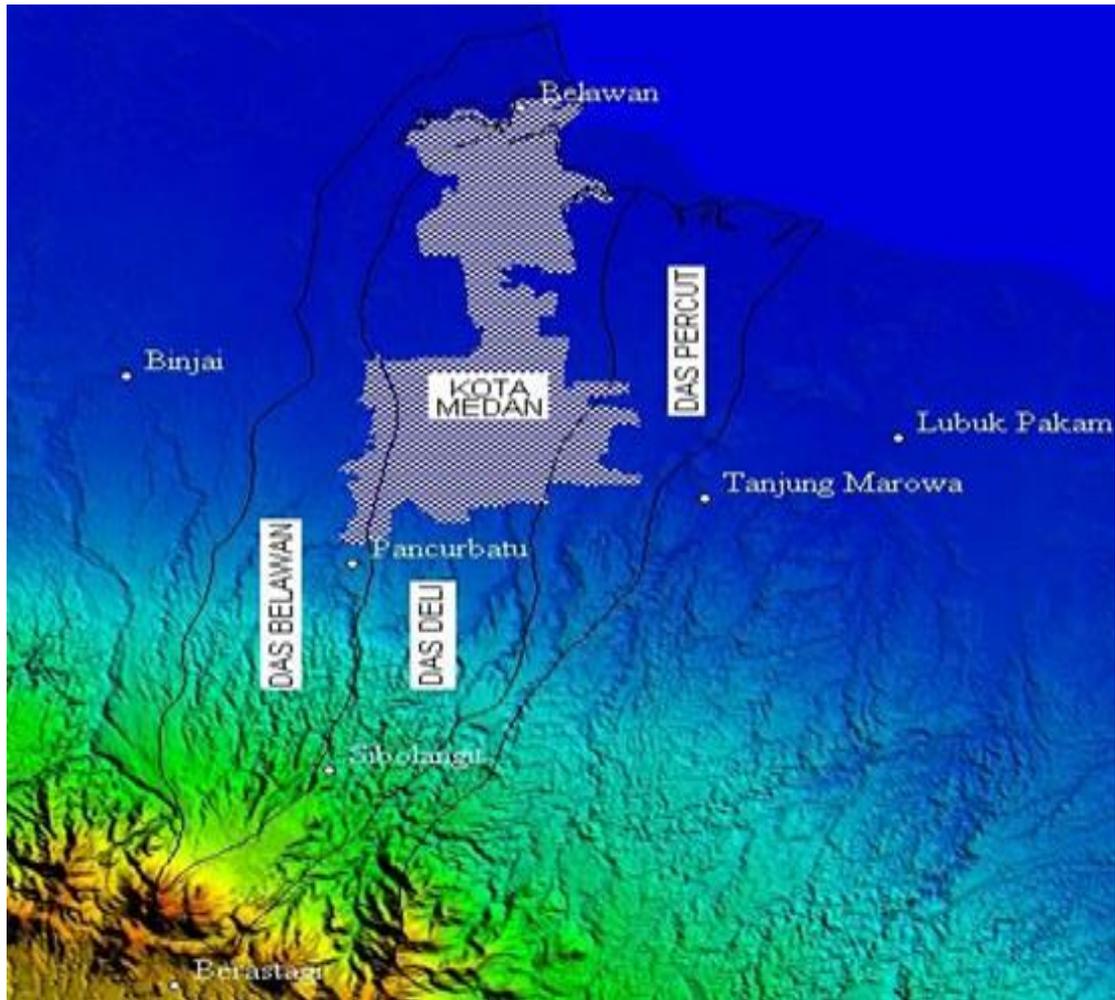


#### 4. Hidrologi dan Klimatologi

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan– Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran

Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 35,45% dan DAS Percut sebesar 22,53%.

**Gambar 1.5.**  
**Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut**



**Tabel 1.2.**  
**Persentase Kota Medan dalam DAS (%)**

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Belawan	40,789.98	2,760.43	6.77
2.	Deli	47,298.01	16,768.89	35.45
3.	Percut	41,252.20	9,293.14	22.53

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu 17.6°C dan suhu maksimum yaitu 37.0°C. Untuk tahun 2022 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 79.68%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 3.99 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117.5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2022 per bulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 291.2 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di kecamatan – kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini adalah dengan melakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

## **5. Wilayah Rawan Bencana**

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

### **1. Daerah Rawan Kebakaran**

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan, kecamatan yang rawan kebakaran adalah, Kecamatan Medan Area, Medan Deli, Medan Johor, Medan Petisah, Medan Timur, Medan Amplas dan Medan Sunggal. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran diantaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, penyelamatan dan lain-lain.

### **2. Daerah Rawan Banjir**

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Kerawanan banjir sedang terdapat pada Kecamatan Medan Johor, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Perjuangan, dan Medan Labuhan. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan.

### **c. Jumlah penduduk**

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah

penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan Tahun 2020-2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3. dan gambar berikut.

Tabel 1.3.  
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk  
Kota Medan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = ([2]/[4])
2020	2.507.124	0.200	265,10	9.457
2021	2.525.677	0.052	265.10	9.527
2022	2,528.065	0.094	265.10	8.656

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Gambar 1.6: Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2020-2022

Dari Tabel 1.3 di atas tampak bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0.115 persen sejak tahun 2020-2022, peningkatan ini akan berdampak pada kepadatan penduduk walaupun luas wilayah Kota Medan pada tahun 2022 mengalami perubahan yakni dari sebesar 265.1 Km<sup>2</sup> menjadi 281.99 Km<sup>2</sup>. Dapat dijelaskan bahwa, peningkatan jumlah penduduk kota tahun 2020-2022 disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari pada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota

Medan. Dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang diperkirakan mencapai 2.528.065 jiwa pada tahun 2022, maka secara demografis, Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan kota

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi umur penduduk Kota Medan Tahun 2022 dapat diuraikan pada Tabel 1.4. dan Gambar 1.6 berikut ini.

Tabel 1.4.  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	60.398	56.161	116.559	4,6
5 - 9	105.323	97.810	203.135	8.0
10 -14	114.425	107.054	221.479	8.80
15 - 19	112.500	106.036	218.536	8.6
20 - 24	111.045	105.385	216.430	8.6
25 - 29	102.115	99.239	201.354	8.0
30 - 34	100.381	98.388	198.769	7.9
35 - 39	101.030	99.718	200.748	7.9
40 - 44	101.808	103.633	205.441	8.1
45 - 49	84.400	89.025	173.425	6.9
50 - 54	77.454	83.580	161.034	6.4
55 - 59	63.073	69.843	132.916	5.3
60 - 64	48.050	55.360	103.410	4.1
65 - 69	35.253	41.119	76.372	3.0
70 - 74	20.730	25.502	46.232	1.8
≥74	20.023	32.202	52.225	2.1
Jumlah	1.258.010	1.270.055	2,528.065	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Dari Tabel 1.4. di atas tampak bahwa, apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Medan tahun 2022 paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 221.479 jiwa atau sebanyak 8.80 persen, kemudian dengan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 218.536 jiwa atau sebanyak 8.6 persen, kemudian dengan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 216.430 jiwa atau sebanyak 8.6 persen, kemudian berumur 40-44 tahun yaitu 205.441 jiwa atau sebanyak 8.1 persen, kemudian berumur 5-9 tahun yaitu 203.135 jiwa atau sebanyak 8.0 persen, kemudian diikuti yang berumur 25-29 tahun yaitu 201.354 jiwa atau sebanyak 8.0 persen, kemudian dengan kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 200.748 jiwa atau sebanyak 7.90 persen, kemudian berumur 30-34 tahun yaitu 198.769 jiwa atau sebanyak 7.90 persen, kemudian berumur 45-49 tahun yaitu 173.425 jiwa atau sebanyak 6.9 persen, kemudian diikuti yang berumur 50-54 tahun yaitu 161.034 jiwa atau sebanyak 6.40 persen, kemudian dengan kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 132.916 jiwa atau sebanyak 5.30 persen, kemudian berumur 0-4 tahun yaitu 116.559 jiwa atau sebanyak 4.60 persen, kemudian berumur 60-64 tahun yaitu 103.410 jiwa atau sebanyak 3.0 persen, kemudian diikuti yang berumur 65 atau lebih yaitu 98.457 jiwa atau sebanyak 3.90 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2022 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuannya dan pengalamannya.

#### **d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan**

Wilayah administratif Kota Medan pada tahun 2022 mengalami penambahan yakni yang sebelumnya memiliki luas 265.10 Km<sup>2</sup> menjadi memiliki luas 281.99 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan. Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Dengan mengacu Tabel 1.5. tersebut di bawah ini dapat dikemukakan bahwa luas wilayah setiap kecamatan relatif bervariasi. Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelan. Berdasarkan luas wilayah dan perkembangan dinamika sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, maka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka secara hipotesis ada baiknya beberapa kecamatan dan kelurahan yang memiliki potensi ekonomi dan wilayah yang relatif luas dapat dimekarkan secara terencana sampai ke tingkat lingkungan. Selanjutnya jumlah kecamatan dan Kelurahan serta luas administratif Kota Medan untuk tiap Kecamatan dapat disajikan pada tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.5.  
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan dan Luas Wilayah Kota Medan

No	Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Luas (Ha)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Medan Tuntungan	9	75	2.869,84	9,82
2	Medan Johor	6	81	1.700,83	5,82
3	Medan Amplas	7	77	1.160,39	3,97
4	Medan Denai	6	82	943,46	3,23
5	Medan Area	12	172	423,64	1,45
6	Medan Kota	12	146	573,48	1,96
7	Medan Maimun	6	66	301,51	1,03
8	Medan Polonia	5	46	876,40	3,00
9	Medan Baru	6	64	542,42	1,85
10	Medan Selayang	6	63	1.646,25	5,63
11	Medan Sunggal	6	88	1.325,41	4,53
12	Medan Helvetia	7	88	1.314,83	4,50
13	Medan Petisah	7	69	527,64	1,80
14	Medan Barat	6	98	630,81	2,16
15	Medan Timur	11	128	888,76	3,04
16	Medan Perjuangan	9	128	452,76	1,55
17	Medan Tembung	7	95	779,53	2,66
18	Medan Deli	6	105	2.039,98	6,98
19	Medan Labuhan	6	99	3.722,31	12,74
20	Medan Marelan	5	88	3.321,46	11,37
21	Medan Belawan	6	143	3.163,19	10,83
Jumlah		151	2.001	28.199	100.00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2022-2042.

#### **e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Perangkat Daerah Kota Medan adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun perangkat daerah Kota Medan terdiri dari: (a) sekretariat Daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; dan (f) kecamatan dengan unit kerja dan jumlah pegawai pemerintah diuraikan pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.  
Unit Kerja Perangkat daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Medan  
Tahun 2022

No.	SKPD	Jumlah Pegawai
[1]	[2]	[3]
1	Pemerintah Kota Medan	3
2	Sekretariat Daerah Kota Medan	202
3	Sekretariat DPRD Kota Medan	49
4	Inspektorat Kota Medan	81
5	Dinas Pendidikan Kota Medan	4.015
6	Dinas Kesehatan Kota Medan	2.186
7	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	143
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan	86
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	65
10	Dinas Sosial Kota Medan	45
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan	306
12	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan	153
13	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	57
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	56
15	Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan	41
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	60
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	128
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	57
19	Dinas Perhubungan Kota Medan	230
20	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	48
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	135
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Medan	32
23	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	112
24	Dinas Perindustrian Kota Medan	53
25	Dinas Perdagangan Kota Medan	70
26	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	43
27	Dinas Kebudayaan Kota Medan	31
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan	57
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	54

No.	SKPD	Jumlah Pegawai
[1]	[2]	[3]
30	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	73
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan	24
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	58
33	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	259
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	34
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	33
36	RSUD Dr Pirngadi Kota Medan	764
37	Dinas Pariwisata Kota Medan	43
38	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	52
39	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	62
40	Kecamatan Medan Timur Kota Medan	95
41	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	83
42	Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	97
43	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	90
44	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	73
45	Kecamatan Medan Baru Kota Medan	62
46	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	76
47	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	60
48	Kecamatan Medan Tembung Kota Medan	78
49	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	57
50	Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	48
51	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	69
52	Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	82
53	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	114
54	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	99
55	Kecamatan Medan Denai Kota Medan	81
56	Kecamatan Medan Area Kota Medan	98
57	Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	44
58	Kecamatan Medan Amplas Kota Medan	92
TOTAL		11.498

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### **f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

##### 1) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, berpedoman kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Medan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dinataranya adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Lainnya yakni pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi Lainnya; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.
2. Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; (3) Belanja Tak Terduga.
3. Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas; (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah pada Penyertaan Modal Pada BUMD; (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 1.7. berikut

Tabel 1.7.  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2022 (rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.522.123.770.774</b>	<b>5.449.280.586.722,85</b>	<b>83,55</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.050.594.560.414</b>	<b>2.230.554.495.746,85</b>	<b>73,12</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.587.779.709.433	1.961.927.116.116,00	75,82
4.1.01.06	Pajak Hotel	164.996.616.971	119.142.028.242,00	72,21
4.1.01.07	Pajak Restoran	347.268.086.582	295.840.716.557,00	85,19

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.01.08	Pajak Hiburan	61.056.776.954	50.227.760.033,00	82,26
4.1.01.09	Pajak Reklame	76.858.814.538	77.633.894.478,00	101,01
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	384.579.840.408	303.903.548.089,00	79,02
4.1.01.11	Pajak Parkir	40.500.000.000	28.112.818.069,00	69,41
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	13.707.172.733	11.693.680.388,00	85,31
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	902.054.109.305	624.639.969.529,00	69,25
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	596.758.291.942	450.732.700.731,00	75,53
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>237.897.911.754</b>	<b>113.129.542.274,00</b>	<b>47,55</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>85.282.396.610</b>	<b>53.452.965.950,00</b>	<b>62,68</b>
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	88.590.000,00	177,18
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	36.166.950.052	22.237.964.550,00	61,49
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	501.761.000	318.761.000,00	63,53
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	36.067.685.558	20.347.909.222,00	56,42
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9.365.000.000	7.417.449.818,00	79,20
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.530.000.000	2.370.767.800,00	93,71
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	18.929.460,00	1892,95
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000.000	652.594.100,00	108,77
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>12.445.266.559</b>	<b>7.194.735.864,00</b>	<b>57,81</b>
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.850.890.059	6.166.542.864,00	56,87
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	273.489.000	178.967.000,00	65,44
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	803.387.500	823.611.000,00	102,52
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000	8.140.000,00	1,63

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.500.000	17.475.000,00	99,86
<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>140.170.248.585</b>	<b>52.481.840.460,00</b>	<b>37,44</b>
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	137.225.723.228	52.426.992.260,00	38,20
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	175.165.677	54.848.200,00	31,31
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.769.359.680	0,00	0,00
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>23.941.152.227</b>	<b>17.677.645.359,53</b>	<b>73,84</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	23.941.152.227	17.677.645.359,53	73,84
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	18.000.000.000	17.253.981.835,53	95,86
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.941.152.227	423.663.524,00	7,13
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>200.975.787.000</b>	<b>137.820.191.997,32</b>	<b>68,58</b>
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>24.531.879.439,00</b>	<b>90,86</b>
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	27.000.000.000	24.531.879.439,00	90,86

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000.000	14.492.934.546,00	144,93
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.605.407.537	1.574.977.498,00	98,10
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.597.880.900	3.189.241.116,00	122,76
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	804.295.519,00	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	183.875.517,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	776.711.563	414.762.051,00	53,40
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	20.000.000	106.788.912,00	533,94
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000	8.218.993.933,00	164,38
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.000.000.000	15.764.476.716,50	394,11
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	159.975.787.000	83.030.901.295,82	51,90
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.050.594.560.414</b>	<b>2.230.554.495.746,85</b>	<b>73,12</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.389.588.278.235</b>	<b>3.150.892.726.119,00</b>	<b>92,96</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.340.366.281.000	2.092.498.622.879,00	89,41
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.328.865.618.000	2.080.997.959.879,00	89,36
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	200.055.508.000	235.313.166.305,00	117,62
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.526.073.171.000	1.499.537.015.294,00	98,26
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.665.737.000	33.107.210.141,00	95,50

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	568.071.202.000	313.040.568.139,00	55,11
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.328.865.618.000</b>	<b>2.080.997.959.879</b>	<b>89,36</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.500.663.000	11.500.663.000,00	100,00
4.2.01.02.01	DID	11.500.663.000	11.500.663.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>11.500.663.000</b>	<b>11.500.663.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.049.221.997.235	1.058.394.103.240,00	100,87
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	874.221.997.235	912.619.667.280,00	104,39
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	874.221.997.235	912.619.667.280,00	104,39
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	175.000.000.000	145.774.435.960,00	83,30
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	175.000.000.000	145.774.435.960,00	83,30
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>1.049.221.997.235</b>	<b>1.058.394.103.240,00</b>	<b>100,87</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.389.588.278.235</b>	<b>3.150.892.726.119,00</b>	<b>92,96</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.940.932.125</b>	<b>67.833.364.857,00</b>	<b>82,78</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	81.940.932.125	67.833.364.857,00	82,78
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan	81.940.932.125	67.833.364.857,00	82,78

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Tingkat Pertama (FKTP)			
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	81.940.932.125	67.833.364.857,00	82,78
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.940.932.125</b>	<b>67.833.364.857,00</b>	<b>82,78</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.522.123.770.774</b>	<b>5.449.280.586.722,85</b>	<b>83,55</b>

**Sumber:** Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2022

Dari Tabel 1.7. di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp.5.449.280.586.722,85 atau 83.55 persen. Sedangkan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp.2.230.554.495.746,85 atau 73.12 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dari pendapatan pajak daerah dapat dicapai sebesar Rp. 1.961.927.116.116,00 atau 75.82 persen, pendapatan retribusi daerah dapat dicapai sebesar Rp.113.129.542.274,00 atau 47.55 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.677.645.359,53 atau 73.84 persen, dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.137.820.191.997,32 atau 68.58 persen; (2) Pendapatan Transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp 3.150.892.726.119,00 atau 92.96 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat dapat direalisasikan sebesar Rp.2.092.498.622.879,00 atau 92.96 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.1.058.394.103.240,00 atau 100.87 persen; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat direalisasikan sebesar Rp.7.833.364.857,00 atau 82.78 persen dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

## 2) Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Medan dijelaskan sebagai berikut. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada Tabel 1.8. berikut

Tabel 1.8.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  
(Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.668.720.191.488</b>	<b>6.047.157.448.152,00</b>	<b>78,85</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.279.980.643.883</b>	<b>4.411.403.212.140,00</b>	<b>83,55</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.134.996.730.799</b>	<b>1.859.029.655.901,00</b>	<b>87,07</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.062.185.876.326	884.482.649.108,00	83,27
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	603.206.819.410	576.580.679.736,00	95,59
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	320.924.041.949	262.938.883.029,00	81,93
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	47.703.444.492	44.052.993.073,00	92,35
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.305.500.240	1.047.954.185,00	80,27
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.951.005.000	3.691.164.557,00	74,55
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.712.957.639.891</b>	<b>2.358.847.879.020,00</b>	<b>86,95</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	699.354.434.023	585.720.705.551,00	83,75
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.552.783.180.975	1.411.575.534.923,00	90,91
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	154.946.035.941	139.819.221.251,00	90,24
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	116.574.370.670	89.578.453.970,00	76,84
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.296.025.508	29.092.417.836,00	70,45
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.557.345.774	54.275.179.466,00	99,48
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.446.247.000	48.786.366.023,00	52,21
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	<b>358.464.172.272</b>	<b>136.623.526.219,00</b>	<b>38,11</b>
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	12.000.000.000	11.660.000.000,00	97,17
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	143.103.965.721	119.701.091.219,00	83,65
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	198.301.551.551	203.780.000,00	0,1
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	5.058.655.000	5.058.655.000,00	100

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Politik			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73.562.100.921	56.902.151.000,00	77,35
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	64.562.100.921	50.892.151.000,00	78,83
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	110.000.000	0	0
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.890.000.000	6.010.000.000,00	67,6
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>5.279.980.643.883</b>	<b>4.411.403.212.140,00</b>	<b>83,55</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.325.507.184.562</b>	<b>1.617.535.812.652,00</b>	<b>69,56</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>389.660.417.050</b>	<b>193.037.001.685,00</b>	<b>49,54</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>450.144.576.665</b>	<b>413.338.138.958,00</b>	<b>91,82</b>
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	88.511.780.961	78.007.956.768,00	88,13
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	62.619.403.900	61.420.048.862,00	98,08
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.034.582.974	2.911.790.620,00	72,17
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	198.449.250	170.759.730,00	86,05
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.853.238.116	97.803.238.375,00	88,23
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.634.587.140	6.921.002.849,00	90,65
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	63.343.908.603	58.381.947.902,00	92,17
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.925.289.860	4.455.698.807,00	90,47
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	84.378.405.422	80.391.253.405,00	95,27
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	242.000.000	228.730.530,00	94,52
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	95.997.600	87.526.620,00	91,18
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	944.577.000	775.197.990,00	82,07
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	18.033.631.339	17.532.307.500,00	97,22
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.328.724.500	4.250.679.000,00	98,2
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>390.122.762.424</b>	<b>325.942.923.423,00</b>	<b>83,55</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	386.730.172.900	322.706.888.934,00	83,44

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	192.589.524	186.040.550,00	96,6
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.200.000.000	3.049.993.939,00	95,31
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>1.080.109.067.923</b>	<b>670.339.241.437,00</b>	<b>62,06</b>
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.045.803.584.166	654.851.621.605,00	62,62
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.525.094.207	1.366.289.403,00	89,59
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	32.568.389.550	13.955.475.429,00	42,85
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	212.000.000	165.855.000,00	78,23
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>15.470.360.500</b>	<b>14.878.507.149,00</b>	<b>96,17</b>
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	712.800.000	576.234.071,00	80,84
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	10.901.400.000	10.757.760.000,00	98,68
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	3.982.500	2.000.000,00	50,22
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	2.500.000.000	2.470.000.000,00	98,8
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.352.178.000	1.072.513.078,00	79,32
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.325.507.184.562</b>	<b>1.617.535.812.652,00</b>	<b>69,56</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>63.232.363.043</b>	<b>18.218.423.360,00</b>	<b>28,81</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	63.232.363.043	18.218.423.360,00	28,81
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>63.232.363.043</b>	<b>18.218.423.360,00</b>	<b>28,81</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.668.720.191.488</b>	<b>6.047.157.448.152,00</b>	<b>78,85</b>

**Sumber:** Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2022

Dari data Tabel 1.6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja untuk tahun 2022 sebesar Rp.6.047.157.448.152,00 atau 78.85 persen. Sedangkan rincian berdasarkan jenis biaya yakni belanja operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.411.403.212.140,00,- atau 83.55 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi tersebut disebabkan efektifnya belanja pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belanja pegawai yang hanya mencapai Rp. 1.859.029.655.901,00,- atau 87.07 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.358.847.879.020,00,- atau 86.95 persen, belanja hibah sebesar Rp. 136.623.526.219,00,- atau 38.11 persen dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 56.902.151.000,00,- atau 77.35 persen. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.617.535.812.652,00,- atau 69.56 persen. Tidak

terrealisasinya anggaran belanja modal tersebut disebabkan belanja modal tanah hanya mencapai Rp. 193.037.001.685,00,- atau 49.54 persen, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 413.338.138.958,00,- atau 91.82 persen, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 325.942.923.423,00,- atau 83.55 persen, belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp. 670.339.241.437,00,- atau 62.06 persen dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp. 14.878.507.149,00,- atau 96.17 persen, sedangkan belanja tak terduga realisasinya hanya sebesar Rp. 18.218.423.360,00,- atau 28.81 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga secara keseluruhan tersebut lebih didasarkan pada efisiensi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tidak ada dari akun belanja daerah yang jumlah realisasi pengeluarannya mencapai anggaran. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah tahun anggaran 2022 tetap mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis, pengelolaan belanja daerah termasuk pertimbangan input, output dan outcome dalam pelaksanaannya.

### **1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah**

Adapun permasalahan strategis pembangunan kota yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Medan, antara lain:

##### **1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berfluktuasi pada periode 2018 sampai 2022. Jika dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi Propinsi dan rata-rata nasional, pertumbuhan Ekonomi Kota Medan masih menunjukkan trend yang positif, akan tetapi pada capaian tahun 2020 terkontraksi sangat dalam disebabkan pandemi Covid-19. Perlambatan perekonomian Kota Medan lebih tinggi dari kontraksi perekonomian yang dialami oleh Propinsi Sumatera Utara dan hal ini harus dicermati khususnya sektor-sektor yang mengalami penurunan yang signifikan.

##### **2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2018 sebesar 8.25% menjadi 8.89 % pada tahun 2022. Sementara capaian tingkat propinsi Sumatera Utara hanya sebesar 11.69 %, tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan karena dengan tingginya angka pengangguran terbuka dikhawatirkan memberi dampak pada aspek sosial, gangguan kamtibmas, meningkatnya angka kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya.

##### **3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata**

Indeks pemerataan pendapatan Kota Medan berfluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022, di kisaran angka 0,34 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Kota Medan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan dengan upaya peningkatan pemerataan pendapatan.

#### **4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal**

Pada periode tahun 2018 sampai tahun 2022 Pemerintah Kota Medan belum dapat menurunkan jumlah penduduk miskin yakni dari 186.450 jiwa pada tahun 2018 menjadi 183.540 jiwa pada tahun 2020 dan meningkat ke angka 187.740 jiwa pada tahun 2022, dengan catatan angka tersebut disampaikan BPS pada awal bulan Maret 2023 setelah pasca terjadinya pandemi. Secara persentase angka kemiskinan di Kota Medan masih dikategorikan rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka jumlah penduduk miskin Kota Medan sangat besar sekitar 8.07 %. Untuk itu perlu upaya dari Pemerintah Kota untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Medan.

##### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu- isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”*

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Medan menjadi Kota yang Berkah**

Medan Kota yang Berkah adalah kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religius warganya, baik lahir dan batin, juga menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan pengokohan sosial. Disamping itu menuju kota sejahtera yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan, kota yang bebas dari korupsi dan narkoba. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

##### **2. Medan menjadi Kota yang Maju,**

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Medan menjadi Kota yang Kondusif**

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan kota maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, maka misi pembangunan kota tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **Misi 1 : Medan Berkah**

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

#### **Misi 2 : Medan Maju**

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

#### **Misi 3 : Medan Bersih**

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

#### **Misi 4 : Medan Membangun**

Melalui Misi Medan Membangun akan mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### **Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

#### **Misi 6 : Medan Inovatif**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

### Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

#### c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Kota bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kota Medan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun program yang berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Medan adalah.

Tabel 1.9.

#### Tujuan, Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Tahun 2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>1. Medan Berkah</b>	1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomidalam menjalankan kehidupan yang berkah		Gini Rasio (Indeks)	0,322
		1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	Pendapatan perkapita (Rupiah)	68.500.000
		1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)	7,82
<b>2. Medan Maju</b>	2.1. Meningkatkan kualitas masyarakatKota Medan		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	82.04
		2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	11.41
		2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	74.10
		2.1.3. Meningkatnya	Pengeluaran per	15.181.000

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>	<b>[5]</b>
		Kesejahteraan Masyarakat	kapita (Rupiah)	
<b>3. Medan Bersih</b>	3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	B
		3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	B
			Indeks Transformasi Data Digital (Indeks)	0,92
		3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Opini BPK (-)	WTP
			Nilai Sakip (Kategori/nilai)	BB
<b>4. Medan Membangun</b>	4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadikota yang layak huni-		Persentase kawasan permukiman layak huni, (%)	97,9
		4.1.1. Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman layak huni, (Ha)	25.857,56
	4.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57.82
		4.2.1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	Persentase luas RTH (%)	12.5

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>[1]</b>	<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>	<b>[5]</b>
<b>5. Medan Kondusif</b>	5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif		Persentase penurunan gangguan ketertiban umum (%)	70
		5.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Jumlah Ketertiban Umum (Kasus) Gangguan	23.000
<b>6. Medan Inovatif</b>	6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.00
		6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi PMDN- (Rp Juta)	4.550.210,56
			Nilai investasi PMA, (US \$)	44.385,00
		6.1.2. Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	62.50
<b>7. Medan Beridentitas</b>	7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	3.00
		7.1.1. Meningkatkan pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal (unit)	132
			Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi (Kawasan)	4

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Adapun kegiatan pembangunan sesuai rencana pembangunan tahun pada tahun 2022 diantaranya adalah:

NO	OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.1.1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.1	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2.1.3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3.1.1	Pengadaan Mebel PAUD
3.1.2	Pengadaan Perlengkapan PAUD
3.1.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
3.1.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
3.1.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
3.1.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
3.1.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD
3.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
4.1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.1.1.	Pengadaan Mebel PAUD
4.1.2	Pengadaan Perlengkapan PAUD
4.1.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
4.1.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
4.1.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
4.1.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
4.1.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD
4.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
5.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
5.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.1.3	Pengadaan Mebel Sekolah
5.1.4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
5.1.5	Pengadaan Perlengkapan Siswa
5.1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
5.1.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
5.1.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5.1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
5.1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
5.1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
5.1.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
5.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5.2.1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
5.2.2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
5.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
5.2.4	Pengadaan Mebel Sekolah
5.2.5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
5.2.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa
5.2.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
5.2.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
5.2.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5.2.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5.2.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
5.2.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
5.2.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.3.1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
6.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.3.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.5.1	Pengadaan Mebel
6.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
7.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
7.1.1	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa
7.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
7.1.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
7.1.4	Pengadaan Mebel Sekolah
7.1.5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
7.1.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa
7.1.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
7.1.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
7.1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7.1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
7.1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
7.1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
7.1.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
8.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
8.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
8.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.1.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1.1.13	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.1.14	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.1.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.1.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.1.17	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1.1.18	Operasional Pelayanan Puskesmas
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3.1.1.	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.2.2.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.3.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.3.2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
3.4	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
4.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
4.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
4.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
4.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
4.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
4.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
4.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
4.1.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
4.1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
4.1.13	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
4.1.14	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
4.1.15	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4.1.16	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.1.17	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.1.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
4.1.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
4.1.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
4.1.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
4.1.22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
4.1.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
4.1.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.1.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
4.1.26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
4.1.27	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
4.1.28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
4.1.29	Operasional Pelayanan Puskesmas
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
5.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
5.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
6.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6.4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.6.2	Pengadaan Mebel
6.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.1	Peningkatan Pelayanan BLUD
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
8.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.3	Pengadaan Obat, Vaksin
8.1.4	Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.1.5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
8.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8.1.8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.10	Pengadaan Obat, Vaksin
8.1.11	Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.1.12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
8.1.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8.1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.1.15	Pengadaan Obat, Vaksin
8.1.16	Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.1.17	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
8.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
8.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
8.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
8.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
8.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
8.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
8.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
8.2.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
8.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
8.2.13	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
8.2.14	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
8.2.15	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8.2.16	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8.2.17	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
8.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
8.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
8.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
8.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
8.2.22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
8.2.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
8.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
8.2.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
8.2.26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
8.2.27	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
8.2.28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
8.2.29	Operasional Pelayanan Puskesmas
9	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
9.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.3	Pengadaan Obat, Vaksin
9.1.4	Pengadaan Bahan Habis Pakai
9.1.5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
9.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
9.1.8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.10	Pengadaan Obat, Vaksin
9.1.11	Pengadaan Bahan Habis Pakai
9.1.12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
9.1.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.1.15	Pengadaan Obat, Vaksin
9.1.16	Pengadaan Bahan Habis Pakai
9.1.17	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
9.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
9.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
9.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
9.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
9.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
9.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
9.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
9.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
9.2.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
9.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
9.2.13	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
9.2.14	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
9.2.15	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
9.2.16	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9.2.17	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
9.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
9.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
9.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
9.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
9.2.22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
9.2.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
9.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
9.2.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
9.2.26	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
9.2.27	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
9.2.28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
9.2.29	Operasional Pelayanan Puskesmas
9.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
9.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
9.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
10	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
10.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.11	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
10.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
10.1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
10.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
10.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
10.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
10.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
10.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
10.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
10.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
10.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
10.1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10.1.12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
10.1.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
10.1.14	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
10.1.15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
10.1.16	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
10.1.17	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10.1.18	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
10.1.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
10.1.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
10.1.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
10.1.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
10.1.23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
10.1.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
10.1.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
10.1.26	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
10.1.27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
10.1.28	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
10.1.29	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
10.1.30	Operasional Pelayanan Puskesmas

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
11.1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
11.1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
11.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
11.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
11.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
11.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
11.1.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
11.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
11.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
11.1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
11.1.12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
11.1.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
11.1.14	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
11.1.15	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
11.1.16	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
11.1.17	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11.1.18	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
11.1.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
11.1.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
11.1.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11.1.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
11.1.21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
11.1.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11.1.23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
11.1.24	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
11.1.25	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
11.1.26	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
11.1.27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
11.1.28	Operasional Pelayanan Puskesmas
3	Dinas Pekerjaan Umum
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.1.2	Pembangunan Jalan
1.1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1.1.4	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1.1.5	Pembangunan Jembatan
1.1.6	Pelebaran Jembatan
1.1.7	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
2.1.3	Rekonstruksi Jalan
2.1.4	Rehabilitasi Jalan
2.1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan
2.1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan
2.1.7	Rehabilitasi Jembatan
2.1.8	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
2.1.9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2.1.10	Rekonstruksi Jalan
2.1.11	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
3.1.2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
3.1.3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
3.1.4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
3.1.5	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
3.1.6	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
3.1.7	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
3.1.8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
3.1.9	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
3.1.11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
3.1.12	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
3.1.13	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
3.1.14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3.1.15	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
3.1.16	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
3.1.17	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
3.1.18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
4.1.2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
4.1.3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4.1.4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
4.1.5	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
4.1.6	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
4.1.7	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
4.1.8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
4.1.9	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
4.1.10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
4.1.11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
4.1.12	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4.1.13	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
4.1.14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
4.1.15	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
4.1.16	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.17	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
4.1.18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
5.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
5.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
5.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
5.1.3	Rekonstruksi Jalan
5.1.4	Rehabilitasi Jalan
5.1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan
5.1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan
5.1.7	Rehabilitasi Jembatan
5.1.8	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
5.1.9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
5.1.10	Rekonstruksi Jalan
5.1.11	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
7.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
7.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
7.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
7.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7.2.1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
7.2.2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
7.2.3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
8.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
8.1.2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
8.1.3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
8.1.4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
8.1.5	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
8.1.6	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
8.1.7	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
8.1.8	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
8.1.9	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
8.1.10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
8.1.11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
8.1.12	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
8.1.13	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
8.1.14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
8.1.15	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
8.1.16	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
8.1.17	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
8.1.18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
9.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
9.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
9.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
9.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.6.2	Pengadaan Mebel
9.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>4</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
2.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
3.1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
3.1.4	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
3.1.5	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
4.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.6.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
5.6.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.6.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.6.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
6.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
6.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
6.2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
6.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
7	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
7.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
8.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
8.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
8.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
8.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
9	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
9.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
9.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
9.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
9.1.3	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
9.1.4	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
9.1.5	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
10	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
10.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
10.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
10.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
10.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
10.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10.2.3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
10.2.4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
10.2.5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
10.2.6	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
10.2.7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
10.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
10.3.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
10.3.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10.3.3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
10.3.4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
10.3.5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
10.3.6	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
10.3.7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
11.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
11.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
11.1.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.1.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.1.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
12.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
12.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
12.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan
<b>5</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
2.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
2.1.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.1.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.1.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3.2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
3.2.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
6	<b>Badab Penanggulangan Bencana Daerah</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
2.2.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
2.2.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.2.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.2.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2.2.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
2.2.8	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
3.1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3.1.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
3.1.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
7	Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1.1.1	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
1.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.2.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1.2.4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
1.2.5	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8	Dinas Sosial
1	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.1.1	Penyediaan Alat Bantu
1.1.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.2.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
2.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
2.1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.2.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
3.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.1.4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
4.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.5.1	Pengadaan Mebel
4.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.8.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.9.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
5.1.1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5.1.3	Penyediaan Makanan
5.1.4	Penyediaan Sandang
5.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
5.2.1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
5.2.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5.2.3	Penyediaan Makanan
5.2.4	Penyediaan Sandang
5.3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5.3.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
5.3.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
9	Dinas Ketenagakerjaan
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
1.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
1.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
1.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
1.2.2	Job Fair/Bursa Kerja
1.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
1.3.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
1.4	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.3.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.3.4	Penyediaan Bahan/Material
3.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.4.1	Pengadaan Mebel
3.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
4.1.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.1.4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.1.5	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
4.16	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1.1.2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
1.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.1.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.2.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.3	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2.4	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2.4.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.5.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
5.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
6.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
6.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
7.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
7.2.4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.2.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
8.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
8.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
8.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.5.2	Pengadaan Mebel
8.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>10</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
2.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.2.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.2.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.2.3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.2.4	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
3	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>
3.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.1.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.1.2	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
5.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
11	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
1	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
3.1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
3.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
4	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
4.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
4.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
5.1	Pengelolaan Sampah
5.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
6.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
6.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
6.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
7.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
7.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
9.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
9.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
10.1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
11.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
11.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
11.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
11.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11.4.5	Penyediaan Bahan/Material

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
11.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
11.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
11.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.5.1	Pengadaan Mebel
11.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.5.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.5.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11.7.1	Pengadaan Mebel
11.7.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.7.7	Penataan Organisasi
11.7.8	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.1.2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.3	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.1.4	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.1	Pengelolaan Sampah
2.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
2.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.1.4	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2.1.5	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5.1	Pengelolaan Sampah
5.1.1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
5.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
5.1.4	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
5.1.5	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.5.2	Pengadaan Alat Besar
6.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Mebel
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
2.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.1.1	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
2.1.2	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
3	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
3.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3.1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3.1.2	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
4	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>
4.1	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
4.1.1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
5.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
5.1.1	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.2.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.3.1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5.3.2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
5.3.3	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
14	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
1.1	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.1.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.1.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
2.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.1.1	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2.2.3	Pemetaan Kependudukan
2.2.4	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
2.2.5	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2.2.6	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.2.7	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.1.3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
3.1.4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4.1.3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
4.1.4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
5.1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
5.1.1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
5.1.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
6.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
6.1.1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
6.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
6.1.3	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
6.1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
6.1.5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
6.1.6	Pengendalian Program KKBPK
6.2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
6.2.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
6.2.2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
6.2.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
6.2.4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
6.2.5	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
6.2.6	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
6.2.7	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
6.2.8	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
7	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
7.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
7.1.1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
7.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
7.1.3	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
7.1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
7.1.5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
7.1.6	Pengendalian Program KKBPK
7.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
7.2.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
7.2.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
8.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8.4.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.4.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.5.1	Pengadaan Mebel
8.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
8.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15	Dinas Perhubungan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.1.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.1.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
5.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
6.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
6.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
6.1.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
6.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
6.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6.2.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
1.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.1.3	Pelayanan Informasi Publik
1.1.4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
1.1.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.6	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
3.1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
4.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>
5.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
5.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
5.2.2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
5.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
17	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>
1	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
1.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
1.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
3.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
5.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
5.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
5.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
5.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
5.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
6	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>
6.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
7.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
8.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
18	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.1.2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.1.3	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.1.4	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
1.2.3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.2.4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
1.2.5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.2.6	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
1.2.7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.2.8	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.1.5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.1.6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.1.7	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.1.8	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
3.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
3.1.3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.1.4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
5.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5.1.2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5.1.3	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5.1.4	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
5.2.3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5.2.4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
5.2.5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5.2.6	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
5.2.7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5.2.8	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
6.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
6.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
6.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
6.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
6.1.5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
6.1.6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
6.1.7	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
6.1.8	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
7.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
7.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
7.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
7.1.3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
7.1.4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
8.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
9	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
9.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
9.1.2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
9.1.3	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
9.1.4	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
9.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>
9.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
9.2.3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9.2.4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
9.2.5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9.2.6	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
9.2.7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9.2.8	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
10	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
10.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
10.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
10.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
10.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
10.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
10.1.5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
10.1.6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
10.1.7	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
10.1.8	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>
11.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
11.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
11.1.2	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
11.1.3	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
11.1.4	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
11.1.5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
11.1.6	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
11.1.7	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
11.1.8	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
11.1.9	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
11.1.10	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
11.1.11	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
11.1.12	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
12	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>
12.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
12.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
12.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
12.1.4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
12.1.5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
12.1.6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
12.1.7	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
12.1.8	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
12.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
12.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
12.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.6.1	Pengadaan Mebel
12.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
12.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN

NO	OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	MODAL
13.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
1.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
1.2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
1.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
1.3.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
1.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
1.3.3	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
1.3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1.3.5	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
1.3.6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1.3.7	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
1.3.8	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
1.3.9	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
1.3.10	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.5.1	Pengadaan Mebel
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.7.3	Penataan Organisasi
2.7.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>
3.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
3.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3.1.5	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4.1.1	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
4.1.2	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
20	<b>Dinas Kebudayaan</b>
1	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
1.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
1.1.2	Penetapan Cagar Budaya
1.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
1.2.1	Pelindungan Cagar Budaya
1.2.2	Pengembangan Cagar Budaya
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>
2.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
3.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
3.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3.2.2	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.2.3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>
4.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
5.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
5.1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.4.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.4.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.5.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.5.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.5.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
1.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
1.1.4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
1.1.6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
1.1.7	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.8	Pengembangan Bahan Pustaka
1.1.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1.1.10	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
1.2.2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
1.2.3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
1.2.4	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2.1.4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2.1.6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2.1.7	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.8	Pengembangan Bahan Pustaka
2.1.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1.0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
3.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
3.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
3.1.4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
3.1.6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
3.1.7	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.8	Pengembangan Bahan Pustaka
3.1.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
3.1.10	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>
4.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
5.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
5.1.4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
5.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
5.1.7	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
5.1.8	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.9	Pengembangan Bahan Pustaka
5.1.10	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
6.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
6.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
6.1.3	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
6.1.4	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
6.1.5	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
6.1.6	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
7.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
7.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
7.1.3	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
8	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>
8.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
8.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
8.1.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
8.1.3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
8.1.4	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
9	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>
9.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
9.1.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
10	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
10.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
10.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.5.1	Pengadaan Mebel
10.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.7.2	Pemeliharaan Mebel
10.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21	Dinas Parawisata
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
1.1.1	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.5.1	Pengadaan Mebel
3.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
4.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
4.1.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
4.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4.2.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
4.3.1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
5.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
5.2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5.2.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
5.2.2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
5.2.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
22	Dinas Pertanian dan Perikanan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
2.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
2.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
2.1.4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
3	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
3.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
3.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.3.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
4.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
4.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
4.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
4.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
4.2.3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
4.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4.4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.4.1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
5.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
5.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
5.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
5.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
5.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.2.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
6.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
6.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
6.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
6.2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
6.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
6.3.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
6.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.4.1	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
6.4.2	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
6.4.3	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
6.5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
6.5.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.1	Pengembangan Prasarana Pertanian

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
7.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
7.1.2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
8.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
8.1.2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.3	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
8.1.4	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
8.1.5	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
8.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
8.2.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
8.2.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
8.2.3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
8.2.4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
8.2.5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
8.2.6	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
9	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>
9.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
9.1.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
9.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
9.2	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
9.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
23	<b>Dinas Perdagangan</b>
1	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>
1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1.1.1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.2	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3.1.2	Pameran Dagang Nasional
3.1.3	Pameran Dagang Lokal
3.1.4	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3.1.5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
4.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
4.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
4.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
4.1.3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.9	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
5.9.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5.9.2	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
5.9.3	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
5.9.4	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
5.9.5	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
5.9.6	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang
5.9.7	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
5.9.8	Penyidikan Metrologi Legal
6	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
6.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
6.1.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
25	<b>Dinas Perindustrian</b>
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
1.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
3.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.6.1	Pengadaan Mebel
4.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26	Sekretariat Daerah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.1.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.1.7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.1.9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.1.11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.1.12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.1.13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.1.14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.1.15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.1.16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.2.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.2.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.2.10	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.2.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.2.12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.2.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.2.14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.2.17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.2.22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.2.23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.2.25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.2.30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.2.31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.32	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.2.34	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.2.35	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.2.36	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.2.37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.3.1	Pengadaan Mebel
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.4.4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.4.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.5	Pemeliharaan Mebel
1.5.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.5.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.12	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5.13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
2.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
3.1	Fasilitasi Kerjasama Daerah
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
3.1.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
3.1.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3.1.4	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
4.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4.1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.1.5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
5.1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
5.1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
5.1.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
<b>27</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.3.3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.3.4	Pengadaan Mebel
1.3.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.3.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.3.7	Pengadaan Mebel
1.3.8	Pemeliharaan Mebel
1.3.9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.3.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.3.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
1.4.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
1.4.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1.4.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
1.5	Layanan Administrasi DPRD
1.5.1	Fasilitasi Fraksi DPRD
1.5.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.2.3	Pembahasan APBD
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan
2.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
2.3.5	Pengawasan Penggunaan Anggaran
2.3.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
2.4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2.5.2	Pelaksanaan Reses
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD
2.7.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
2.7.2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
<b>28</b>	<b>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
2.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
2.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
2.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2.2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.2.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.2.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.2.7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
3.1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>
3.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
3.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
3.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik
3.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
3.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
3.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3.2.4	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2.5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
3.2.6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
29	<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
2.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
2.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
2.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2.1.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
2.1.8	Penagihan Pajak Daerah
2.1.9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
2.1.10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
2.1.11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
30	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Pengadaan Mebel
1.7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
2.1.5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2.1.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2.1.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
2.1.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2.2.2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.2.4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.3.1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.1.1	Penyusunan Standar Harga
3.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah
3.1.4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
31	<b>Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
1	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
1.1	Pengembangan Kompetensi ASN
1.1.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
1.1.3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.1.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.1.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.1.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1.5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.1.6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.2.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.3.1	Pengadaan Mebel
3.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
4.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
4.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
4.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
4.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
4.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
4.1.5	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
6.1	Mutasi dan Promosi ASN
6.1.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
6.1.2	Pengelolaan Promosi ASN
6.2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
6.2.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
6.2.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
6.2.3	Pembinaan Disiplin ASN
6.2.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
32	Badan Penelitian dan Pengembangan
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
1.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.1.3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
1.1.4	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
1.1.5	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
1.1.6	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1.1.7	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
1.1.8	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2.1.4	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.3.4	Pengadaan Mebel
3.3.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.3.6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.3.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.3.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.4.4	Pengadaan Mebel
3.4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.4.6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.4.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.4.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.5.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.5.4	Pengadaan Mebel
3.5.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.5.6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.5.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.5.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.6.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.6.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.6.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.6.4	Pengadaan Mebel
3.6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.6.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.6.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.6.9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
33	Inspektorat
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
1.1.3	Reviu Laporan Kinerja
1.1.4	Reviu Laporan Keuangan
1.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal
1.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
1.1.7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1.1.8	Reviu Laporan Kinerja
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan
2.1.5	Kerjasama Pengawasan Internal
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2.1.7	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2.1.8	Reviu Laporan Kinerja
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
4	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
4.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.5.1	Pengadaan Mebel
4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.6.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.6.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.6.6	Pemeliharaan Mebel
4.6.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.6.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.6.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
5.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.1	Pendampingan dan Asistensi
6.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.1.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
34	Kecamatan
34.1	Kecamatan Medan Belawan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.2	Kecamatan Medan Labuhan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Pengadaan Mebel
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.3.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.3.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.3.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.3	<b>Kecamatan Medan Kota</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.3.6	Pengadaan Mebel
1.3.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.4	<b>Kecamatan Medan Timur</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pengadaan Mebel
1.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.3.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5.2	Pengadaan Mebel
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.6.2	Pengadaan Mebel
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.5	Kecamatan Medan Helvetia
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.6	Kecamatan Medan Marelan
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.4.1	Pengadaan Mebel
3.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.6.2	Pemeliharaan Mebel
3.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
4.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
4.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
4.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
4.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
5.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
5.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.2.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5.2.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.2.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5.2.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5.2.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.2.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5.2.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.3.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
34.7	Kecamatan Medan Denai
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.8	<b>Kecamatan Medan Area</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1.4.2	Pengadaan Mebel
1.4.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.7	Penataan Organisasi
1.7.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Pengadaan Mebel
2.2.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.2.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.22	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4.1.3	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.9	<b>Kecamatan Medan Baru</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
4.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.2.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.2.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.10	<b>Kecamatan Medan Polonia</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.3.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.1.3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
3.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.2.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.2.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.2.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4.2.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
5.1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
6.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.1.3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
6.1.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
34.11	<b>Kecamatan Medan Tembung</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1	Pengadaan Mebel
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
34.12	<b>Kecamatan Medan Perjuangan</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pengadaan Mebel
1.2.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.2.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.2.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2	Pengadaan Mebel
1.4.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.5.2	Pengadaan Mebel
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.13	<b>Kecamatan Medan Barat</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.1.4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.14	<b>Kecamatan Medan Tuntungan</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.5.5	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Pengadaan Mebel
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6.5	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Pemeliharaan Mebel
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8	Penataan Organisasi
1.8.1	Pengadaan Mebel
1.8.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8.5	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.15	Kecamatan Medan Selayang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.16	<b>Kecamatan Medan Petisah</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.17	<b>Kecamatan Medan Johor</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.18	Kecamatan Medan Maimun
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
34.19	Kecamatan Medan Deli
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Mebel
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.4.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.4.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.4.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Pengadaan Mebel
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.3.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.3.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.3.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
34.20	<b>Kecamatan Medan Amplas</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	Kecamatan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.1.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.1.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
34.21	Kecamatan Medan Sunggal
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.3.1	Pengadaan Mebel
2.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
3.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6.1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6.1.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6.1.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6.1.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
35	Kesatuan Bangsa dan Politik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.8	Penataan Organisasi
1.8.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.1.4	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.1.5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.1.6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.1.7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
4.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4.1.4	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

<b>NO</b>	<b>OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
4.1.5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4.1.6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4.1.7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	OPD/PORGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Dasar Penerapan Standard Pelayanan Minimal

Peraturan perundang - undangan yang mendasari penerapan standar pelayanan minimal berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;

**b. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan strategi dan teknik pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan. Adapun yang menjadi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah ***“ Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”***

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan, maka arah kebijakan umum daerah dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2022 antara lain:

1. Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Medan Berkah
  - a) Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan serta pelatihan gratis masyarakat di tingkat Kelurahan.
  - b) Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu
  - c) Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
  - d) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.

2. Dalam mewujudkan Misi Kedua: Medan Maju
  - a) Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.
  - b) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan
  - c) Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
  - d) Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah
  - e) Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang
  - f) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit
  - g) Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat
  - h) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah
  - i) Meningkatkan pembinaan kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
3. Dalam mewujudkan Misi Ketiga: Medan Bersih
  - a) Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi
  - b) Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan
  - c) identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan di transformasi menjadi data digital
  - d) Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - e) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah
4. Dalam mewujudkan Misi Keempat: Medan Membangun
  - a) Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan
  - b) melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH
  - c) Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman
  - d) Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba
  - e) Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas
5. Dalam mewujudkan Misi Kelima: Medan Kondusif
  - a) Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman
  - b) Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba
  - c) Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas
6. Dalam mewujudkan Misi Keenam: Medan Inovatif

- a) Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata
  - b) Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media
  - c) Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan professional
  - d) Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan.
7. Dalam mewujudkan Misi Ketujuh: Medan Beridentitas
- a) Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
  - b) mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya.
  - c) menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)

**b. Gambaran Orientasi Dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2022**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Medan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021. Pada tahun 2022 ada 8 (delapan) OPD yang melaksanakan standar pelayanan minimal yakni dengan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

**1. Dinas Pendidikan.**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Pendidikan diarahkan kepada:

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.

**2. Dinas Kesehatan**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Kesehatan diarahkan kepada:

- a. Peningkatan Pelayanan BLUD.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Peningkatan Akses, cakupan dan kualitas layanan jaminan kesehatan masyarakat.

**3. Dinas Pekerjaan Umum**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum diarahkan kepada:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan
- b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir.
- c. Peningkatan kondisi drainase kota dan lingkungan.

**4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang diarahkan kepada:

- a. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
- b. Penataan bangunan cagar budaya dan heritage
- c. Mendorong peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- d. Peningkatan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis.
- e. Pembangunan utilitas/prasarana dan sarana kota, dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.

**5. Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran diarahkan kepada:

- a. Peningkatan pencapaian waktu tanggap kebakaran.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran
- c. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap kebakaran.

**6. Satuan Polisi Pamong Praja**

Kebijakan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan kepada:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan dan pembinaan hukum daerah
- c. Meningkatkan koordinasi dan upaya kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

**7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kebijakan penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan kepada:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
- b. Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

**8. Dinas Sosial**

Kebijakan penyelenggaraan Dinas Sosial diarahkan kepada:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
- b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
- c. Pengembangan fasilitas, mekanisme serta sarana prasarana dalam penanganan PMKS dan penyandang disabilitas.
- d. Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga penanggulangan kemiskinan.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat diketahui dari berbagai indikator kinerja dalam berbagai bidang. Bagaimana keberhasilan suatu daerah dalam pelayanan public diukur dari sejauh mana capaian yang diperoleh daerah dimaksud terkait berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui beberapa capaian indikator kinerja antara lain : Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output (IKK Keluaran/Output), Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (IKK Hasil/Outcome, dan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Bagaimana capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan terkait berbagai indikator tersebut akan diuraikan berikutnya

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan kinerja makro diukur dari beberapa indikator kinerja makro yang secara garis besar terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja makro tersebut menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial yang dialami dan terjadi di Kota Medan selama periode yang diperhitungkan. Perkembangan capaian kinerja makro Kota Medan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table 2.1. berikut.

Table 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Medan Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	81,21	81,76	0,68
2.	Angka Kemiskinan	8,34%	8,07%	(3,24)
3.	Angka Pengangguran	10,81%	8,89%	(-17,76)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	2,62%	4,71%	79,77
5.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,402	0,399	(-0,75)
6	Pendapatan Perkapita	Rp 103,51 juta	Rp 112,31 juta	8,502

Table 2.1. di atas mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Kota Medan tahun 2022 relative mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum indikator kinerja makro tahun 2022 mengalami peningkatan atau perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Beberapa indikator dengan angka yang meningkat dan menunjukkan adanya perbaikan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan Perkapita. Demikian juga beberapa indikator dengan angka yang menurun tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan antara lain Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran dan Gini Rasio. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja makro Pemerintah Kota Medan tahun 2022 relatif mengalami peningkatan atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

## 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan menggambarkan bagaimana realisasi capaian kinerja yang berhasil diperoleh/diraih atas berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja urusan pemerintahan diukur dari berbagai jenis indikator kinerja kunci (IKK) yang secara umum menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci (IKK) secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran atau Output
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil atau Outcome
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Keluaran (*output*) adalah suatu bentuk produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas penggunaan sumber daya pembangunan dengan tujuan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Mengacu kepada konsep tersebut maka indikator kinerja kunci (IKK) Keluaran atau Output akan menunjukkan kinerja yang dicapai berupa ukuran terkait produk akhir (berupa barang atau jasa) atas proses penggunaan sumber daya tertentu. Jenis indikator kinerja kunci (IKK) Keluaran atau Output disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci (IKK) Keluaran atau Output untuk tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)  
Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri &	372	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Dapodik	-
		2.	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3.	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada kegiatan yang menampung pemberian
		4.	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	1.927	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Aplikasi GTA	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		5.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri & Swasta)	5.258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan	3.603	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		7.	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	1.603	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.234	Dinas Pendidikan : Dapodik	-
		9.	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	25.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		10.	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		11.	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.134	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		12.	Jumlah Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.708	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		13.	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta)	324	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		14.	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta)	265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		15.	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar/MI (Negeri & Swasta)	14.444	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		16.	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/MTs (Negeri & Swasta)	8.676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		17.	Jumlah kebutuhan minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta)	324	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Aplikasi GTA	-
		18.	Jumlah kebutuhan minimal Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta)	265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Aplikasi GTA	-
		19.	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta)	151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		20.	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta)	99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		21.	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, dan Sertifikat Pendidik	10.870	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		22.	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, dan Sertifikat Pendidik	7.104	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		23.	Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah	822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		24.	Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta ) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah	380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		25.	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah SMA sederajat	1.002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		26.	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta) yang memiliki ijazah SMA sederajat	522	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		27.	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi (Negeri & Swasta)	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		28.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta) yang menerima perengkan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	-	Belum tersedia anggaran tahun 2022
		29.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	-	Belum tersedia anggaran tahun 2022
		30.	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta)	27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		31.	Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta)	6.278	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
		32.	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta ) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	372	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		33.	Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri & Swasta) ) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
2	Kesehatan	34.	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	13	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		35.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		36.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	44	Dinas Kesehatan : Sekretariat	-
		37.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	246	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		38.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neo natal esensial sesuai standar	123	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		39.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	205	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		40.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	410	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		41.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar	82	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		42.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar	205	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		43.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	167	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		44.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	167	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		45.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar	82	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		46.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar	205	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		47.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	161	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
3	Pekerjaan Umum	49.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Kawasan permukiman di wilayah sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian PU-PR
		50.	Panjang sungai di kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Kawasan permukiman di wilayah sungai merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian PU-PR
		52.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		53.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		54.	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air di WS kewenangan kab/kota	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Data Tidak tersedia
		55.	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Data Tidak tersedia
		56.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	Bukan kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		57.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	-	Dinas SDA, BM,BK	Pemko Medan tidak memiliki Daerah Irigasi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
		58.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	Dinas SDA, BM,BK	
		59.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	Dinas SDA, BM,BK	
		60.	Pemenuhan dokumen <b>RISPAM</b> kab/kota	Ada	Dinas PKP,CK,TR	
		61.	Tersusun dan ditetapkannya <b>JAKSTRADA</b>	Ada	Dinas PKP,CK,TR,	-
		62.	Jumlah <b>BUMD</b> dan <b>UPTD</b> kab/kota Penyelenggara	Tidak ada	Dinas PKP,CK,TR	-
		63.	Jumlah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan <b>SPAM</b>	Tidak ada	Dinas PKP,CK,TR	-
		64.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan <b>SPAM</b> dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak ada	Dinas PKP,CK,TR	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		65.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan <b>SPALD-S</b>	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		66.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan <b>SPALD-T</b>	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		67.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan <b>SPALD-S</b> dan <b>SPALD-T</b>	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		68.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	4.890	Dinas PKP,CK,TR	-
		69.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	4.890	Dinas PKP,CK,TR	-
		70.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	- Perpipaan : 21.082 - L2T2 = 56.487 - Total : 77.569	Dinas PKP,CK,TR	-
		71.	Kinerja penyediaan pelayanan <b>SPALD-S</b> akses dasar	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		72.	Kinerja penyediaan pelayanan <b>SPALD-S</b> akses aman	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		73.	Kinerja penyediaan pelayanan <b>SPALD-T</b> akses aman	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		74.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		75.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		76.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		77.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke <b>IPALD</b>	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		78.	Kinerja penyediaan penyedotan lumpur tinja	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		79.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		80.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1.117	DPM-PTSP	-
		81.	Penetapan Perda tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PKP,CK,TR	-
		82.	Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	Ada	Dinas PKP,CK,TR	-
		83.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	93	Dinas PKP,CK,TR	-
		84.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kab./Kota	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		85.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		86.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota yang dipelihara/ dirawat	-	Dinas PKP,CK,TR	Data belum tersedia
		87.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	3.279,5 km	Dinas SDA, BM,BK	-
		88.	Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas SDA, BM,BK	-
		89.	Panjang jembatan yang dibangun	228 m	Dinas SDA, BM,BK	-
		90.	Panjang jalan yang ditingkatkan	13.576,6 m	Dinas SDA, BM,BK	-
		91.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	21,65 m	Dinas SDA, BM,BK	-
		92.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	110.169,9 m	Dinas SDA, BM,BK	-
		93.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	180 m	Dinas SDA, BM,BK	-
		94.	Panjang jalan yang dipelihara	125.777,6 m	Dinas SDA, BM,BK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		95.	Panjang jembatan yang dipelihara	-	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		96.	Jumlah pelatihan tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota	9	Dinas SDA, BM,BK	-
		97.	Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi/ analis yang terlatih di wilayah kab/kota	444 orang	Dinas SDA, BM,BK	-
		98.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota	330 orang	Dinas SDA, BM,BK	-
		99.	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Dinas SDA, BM,BK	Tidak terlaksana di tahun 2022
		100.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		101.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		102.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		103.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak Ada	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		104.	Tersedianya data dan profil OPD Sub Urusan jasa konstruksi Kab/Kota	Tersedia	Dinas SDA, BM,BK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		105.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja ( <b>LPPK</b> ) yang diregistrasi oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Tersedia	Dinas SDA, BM,BK	-
		106.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tersedia	Dinas SDA, BM,BK	-
		107.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tersedia	Dinas SDA, BM,BK	-
		108.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tersedia	Dinas SDA, BM,BK	-
		109	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan <b>IUJK</b> badan usaha dan <b>TDUP</b> yang disetujui	Tidak Tersedia	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	-
		110	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Tersedia	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	-
		111.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Tersedia	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		112.	Tersedianya data dan informasi hasil ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Tersedia	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	-
		113.	Jumlah badan usaha yang memiliki <b>IUJKN</b> di wilayah kab/kota	-	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		114.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki <b>TDUP</b> di wilayah kab/kota	-	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		115.	Jumlah badan usaha yang memiliki <b>IUJKN</b> yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	-	Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		116.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	208	Dinas SDA, BM,BK	-
		117.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan <b>IUJK</b> badan usaha dan <b>TDUP</b> yang disetujui	-	Bukan Kewenangan Dinas SDA, BM,BK	Data belum tersedia
		118.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan	22	Dinas SDA, BM,BK	-
		119.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas SDA, BM,BK	-
		120.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	22	Dinas SDA, BM,BK	-
4	Perumahan Rakyat	121.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	-	Data Tidak Tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		122.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya & Tata Ruang ( PKP,CK,TR)	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		123.	Jumlah RT, RW dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		124.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		125.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		126.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		127.	Jumlah unit rumah dan lokasi rumah sewa korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		128.	Jumlah RT, RW dan jiwa korban bencana terfasilitasi	-	Dinas PKP,CK,TR	Pada tahun 2022 tidak ada bencana di Kota Medan
		129.	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	-	Data Tidak Tersedia
		130.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan <b>SPM</b>	12 lokasi/573 persil	Dinas PKP,CK,TR	-
		131.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan <b>SPM</b>	3 lokasi	Dinas PKP,CK,TR	-
		132.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan <b>SPM</b>	-	-	Data Tidak Tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		133.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan <b>SPM</b>	138 unit	Dinas PKP,CK,TR	-
		134.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan <b>SPM</b>	-	-	Data Tidak Tersedia
		135.	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	11.318 m <sup>2</sup>	Dinas PKP,CK,TR	-
		136.	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha	506,6 ha	Dinas PKP,CK,TR ; KOTAKU	-
		137.	Jumlah unit peningkatan kualitas <b>RTLH</b>	56 unit	Dinas PKP,CK,TR	-
		138.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	123,87 ha	Dinas PKP,CK,TR ; KOTAKU	-
		139.	Jumlah rumah di kab/kota	523.097 unit	Dinas PKP,CK,TR ; KOTAKU	-
		140.	Jumlah rumah tidak layak huni	4.465 unit	Dinas PKP,CK,TR ; KOTAKU	-
		141.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	-	Data Tidak Tersedia
		142.	Rasio rumah dan KK	$\frac{523.097}{602.574} \times 100\% = 86,81\%$	Dinas PKP,CK,TR ; KOTAKU	-
		143.	Jumlah rumah pembangunan baru	-	-	Data Tidak Tersedia
		144.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi <b>PSU</b>	7 Perumahan	Dinas PKP,CK,TR	-
		145.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	524.239 unit	Dinas PKP,CK,TR	-
		146.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	-	Data belum tersedia
		147.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi ( <b>on site/ off site</b> )	462.780 unit	Dinas PKP,CK,TR ; ROADMAP	-
		148.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi <b>RTNH</b>	-	-	Data belum tersedia
		149.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses <b>PJU</b>	-	-	Data belum tersedia
		150.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	-	Data belum tersedia
		151.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	-	-	Data belum tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		152.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	-	Data belum tersedia
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	153.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	20.063	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP)	-
		154.	Jumlah Satlinmas yang	294	Satpol-PP	-
		155.	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Tersedia	Satpol-PP	-
		156.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	26 Peraturan	Satpol-PP	-
		157.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8 orang	Satpol-PP	-
		158.	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	42 SOP	Satpol-PP	-
		159.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedia	Satpol-PP	-
		160.	Persentase penyelesaian dokumen <b>KRB</b> sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	-
		161.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kejadian banjir : $\frac{655.675}{1.427.186} \times 100\% = 45.94\%$	BPBD	-
		162.	Persentase penyelesaian dokumen <b>RPB</b> sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	BPBD	Sudah Dilaksanakan
		163.	Persentase penyelesaian dokumen <b>Renkon</b> sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Dilaksanakan Tahun 2023
		164.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{690}{1.427.186} \times 100\% = 0.05\%$	BPBD	-
		165.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{690}{1.427.186} \times 100\% = 0.05\%$	BPBD	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		166.	Persentase warga negara yang mendapat layanan <b>pusdalops</b> penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{388.872}{1.427.186} \times 100\% = 27.24\%$	BPBD	-
		167.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{53.541}{1.427.186} \times 100\% = 3.75\%$	BPBD	-
		168.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	BPBD	-
		169.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	BPBD	-
		170.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{97}{97} \times 100\% = 100\%$	BPBD	-
		171.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{53.451}{53.451} \times 100\% = 100\%$	BPBD	-
		172.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kab/ kota	341	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota (DPK-PK)	-
		173.	Tersediannya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	5	DPK-PK	-
		174.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian ( <i>shift</i> ) di kantor kecamatan	-	DPK-PK	-
		175.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	5	DPK-PK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		176.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	40	DPK-PK	-
		177.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	50	DPK-PK	-
		178.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	840	DPK-PK	-
		179.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2	DPK-PK	-
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	180.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	54 Laporan	Dinas Sosial : Aplikasi Lapor	-
		181.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anak Terlantar = 2</li> <li>▪ Lansia Terlantar = 2.051</li> <li>▪ Gel. Pengemis = 372</li> <li>▪ <b>Jumlah = 2.424</b></li> </ul>	Dinas Sosial	-
		182.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	15 orang	Dinas Sosial : SK Kepala Dinas	-
		183.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	250 orang	Dinas Sosial : Hasil Penertiban	-
		184.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 unit	Dinas Sosial	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		185.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	400 orang	Dinas Sosial : Kemensos	-
		186.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	Dinas Sosial : Komp Griya Pinang Mas Block C No. 1 P. Baris	-
		187.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	-	Data belum tersedia
		188.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	65 orang	Dinas Sosial	-
		189.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1 unit : Kursi Roda	Dinas Sosial	-
		190.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	-	-	Data belum tersedia
		191.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket	-	-	Data belum tersedia
		192.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	-	Data belum tersedia
		193.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PKH = 175 orang,</li> <li>▪ TKSK = 21 orang,</li> <li>▪ PEKSOS = 3 orang,</li> <li>▪ P.LANSIA = 10 orang</li> <li>▪ P.DISABILITAS = 9 orang</li> <li>▪ PSM = 50 orang</li> <li>▪ Karang Taruna = 22 orang</li> <li>▪ TAGANA = 40 orang</li> <li>▪ <b>TOTAL = 330</b></li> </ul>	Dinas Sosial	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		194.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	234 orang	Dinas Sosial; Hasil Penertiban	-
		195.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	-	Data belum tersedia
		196.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	-	Data belum tersedia
		197.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6 orang	Dinas Sosial; Rujukan RS Pirngadi	-
		198.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	234 orang	Dinas Sosial : Hasil Penertiban	-
		199.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	234 orang	Dinas Sosial : Hasil Penertiban	-
		200.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	30 orang	Dinas Sosial : Penanganan Orang Terlantar ke RS Pirngadi	-
		201.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	11.404	Dinas Sosial : Korban banjir dan kebakaran	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		202.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	500 orang	Dinas Sosial	-
		203.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4	Dinas Sosial	-
		204.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	-	Data belum tersedia
		205.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1	Dinas Sosial	-
		206.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial	330 orang	Dinas Sosial	-
7	Tenaga Kerja	207.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	-	Dinas Tenaga Kerja : Subbag Penyusunan Program	Dokumen RTK belum tersusun sehingga tidak dapat membandingkan kesesuaian RTK dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dokumen Renstra, penyusunan RTK akan dianggarkan pada tahun 2024
		208.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-	Dinas Tenaga Kerja : Subbag Penyusunan Program	Tidak dapat dihitung persentase akurasi proyeksi indikator dalam RTK karena penyusunan RTK sesuai Renstra akan dianggarkan pada tahun 2024
		209.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja (RTK) di kabupaten/kota	-	Dinas Tenaga Kerja : Subbag Penyusunan Program	Tidak ada laporan perusahaan yang menyusun RTK karena belum tersosialisasinya dan tersusunnya RTK Mikro di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		210.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	10 -----x 100% = 100% 10	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		211.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	106 -----x 100% = 21,24% 499	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		212.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	499 -----x 100% = 189,73% 263	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		213.	Persentase LPK yang terakreditasi	15 -----x 100% = 11,19% 134	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		214.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	134 -----x 100% = 100% 134	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		215.	Jumlah penganggur yang dilatih	263 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		216.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	260 -----x 100% = 98,85% 263	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		217.	Persentase penyerapan lulusan	190 -----x 100% = 36,39% 522	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Lembaga dan Instruktur	-
		218.	Lulusan bersertifikat kompetensi	342 -----x 100% = 65,52% 522	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Sertifikasi	-
		219.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Belum ada kegiatan pelatihan bagi CPMI/CTKI
		220.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Belum ada kegiatan pelatihan bagi CPMI/CTKI

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		221.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{20}{12.539} \times 100\% = 0,16\%$	Dinas Tenaga Kerja :Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan	-
		222.	Data tingkat produktivitas total	$9,98\% - (6,65\% + 3,27\%) = 0,06\%$	Dinas Tenaga Kerja :Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan	-
		223.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{1.770}{12.539} \times 100\% = 14,12\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Syarat kerja	-
		224.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{679}{21} \times 100\% = 3233,33\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Syarat kerja	-
		225.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Pencatatan SP/SB 2021 = 21 Pengurus Unit Kerja (PUK)	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Kelembagaan	-
		226.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{215}{2.449} \times 100\% = 8,78\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Pengupahan	-
		227.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{9.449}{12.539} \times 100\% = 75,35\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Jaminan Sosial & Purna Kerja	-
		228.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{197}{12.539} \times 100\% = 1,57\%$	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		229.	Jumlah mogok kerja	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Hubungan Industrial	Tidak ada pemberitahuan mogok kerja di perusahaan
		230.	Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada penutupan perusahaan	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Hubungan Industrial	Tidak ada pemberitahuan laporan penutupan perusahaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		231.	Jumlah perselisihan kepentingan	82 Perselisihan	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		232.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Kelembagaan	Tidak ada perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam 1 perusahaan
		233.	Jumlah perselisihan PHK	102 perselisihan	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		234.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	304 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		235.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	56 perselisihan	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		236.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada : LKS Tripart Kota Medan, Nomor : 560/40.K tanggal 27 April 2022	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Kelembagaan	-
		237.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	58 -----x 100% = 29,44% 197	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Perselisihan	-
		238.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	969 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-
		239.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Lk. = 658 orang Pr. = 2.232 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-
		240.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	23 BKK	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		241.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	Tidak ada yang mendaftar AK I untuk tenaga kerja khusus baik online maupun offline
		242.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar	-
		243.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	Data izin LPTKS tidak ada yang diterbitkan dari DPM-PTSP
		244.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	1945 Perjanjian Penempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	-
		245.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	23 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-
		246.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	50 -----x 100%= 3,98% 1.254	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	-
		247.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1.254 orang	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	-
		248.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	3 -----x 100% =21,420% 14	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	-
		249.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tidak ada kegiatan pelatihan PMI di tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		250.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tidak ada kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya
		251.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Belum terbentuk LTSA di Kota Medan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	252.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG	57 Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A, PM dan PP-KB) :	-
		253.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota	95 Program 106 Kegiatan 112 Sub kegiatan	Dinas P3A, PM dan PP-KB: Impelemntasi Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	-
		254.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/pemko (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	Belum ada pendataan
		255.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	-	Belum ada pendataan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		256.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{146}{146} \times 100\% = 100\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
		257.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	15 Lembaga	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		258.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	-	Belum ada data
		259.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan	-	-	Belum ada data
		260.	Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih	-	-	Belum ada data
		261.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-	-	Belum ada data
		262.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kota	-	-	Belum ada data
		263.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	Belum ada data
		264.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga	Dinas P3A, PM dan PP-KB : SK UPT	-
		265.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{52}{528} \times 100\% = 9,84\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
9	Pangan	266.	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	-	Belum ada dan masih tahap proses Perencanaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		267.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada : Pangan Lainnya yakni Kacang Hijau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Bidang Ketersediaan Pangan	-
		268.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-	-	Belum ada regulasi Harga Minimum DaerahDaerah
		269.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	13 Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Bidang Konsumsi Pangan	-
		270.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada : 1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Peta Ketahanan Pangan	-
		271.	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada : 3 Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Kegiatan Penanganan RT Rawan Pangan	-
		272.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	-	Belum tersedia cadangan pangan kota karena masih ada cadangan pangan Pemerintah di Bulog
		273.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	$\frac{151.215-27}{15.215} \times 100\% = 99,82\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
10	Pertanahan	274.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/ Wali Kota	8 SK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tara Ruang	-
		275	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i> dan Daftar Subyek	-	-	Data belum tersedia
		276.	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ <i>Absentee</i>	6 SK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tara Ruang	-
		277	Dokumen Izin membuka tanah	-	-	Data belum tersedia
		278	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota	8/8	100%	Data belum tersedia
11	Lingkungan Hidup	279.	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	- IKA (Indeks Kualitas Air) = 68,36 - IKU (Indeks Kualitas Udara) = 75,88 - IKL (Indeks Kualitas Lahan) = 24,91 - IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL) = (0,376 x 68,36) + (0,405 x 75,88) + (0,219 x 24,91) = 61,89 poin - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota = 61,89	Dinas Lingkungan Hidup	-
		280.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	a. Angkutan pengelolaan sampah = 81.681 unit; Volume timbulan sampah = 628.749,22 ton/tahun	Dinas Lingkungan Hidup	-
				b. Kapasitas TPA = 0 ; Volume timbunan sampah = 0	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada data karena TPA masih Open Dumping

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
				c. Jumlah TPST = 0 ; Jumlah sampah pd masing-masing lingkungan = 0	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada TPST; yang ada masih TPS Mobile
		281.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	321 -----x 100% = 109.93% 292	Dinas Lingkungan Hidup	-
		282.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	-	-	Diklat PPLHD di anggarkan di KLHK , kuota untuk Kota Medan tidak tersedia
		283.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kab/ kota	-	-	Belum ada Program dan Kegiatan tersebut, Kota Medan tidak mempunyai MHA
		284.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	-	Belum ada Program dan Kegiatan tersebut, Kota Medan tidak mempunyai MHA
		285.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada di anggarkan
		286.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	25 -----x 100% = 100% 25	Dinas Lingkungan Hidup	-
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	287	Penerbitan akta perkawinan	7.702 -----x 100%= 100% 7.702	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		288	Penerbitan akta perceraian	412 -----x 100%= 100% 412	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		289	Penerbitan akta Kematian	$\frac{7.075}{7.075} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
		290	Penyajian data kependudukan	$\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	291.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
		292.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
		293.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
		294.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	-	Tidak ada desa di wilayah Kota Medan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	295.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A, PM dan PP-KB)	-
		296.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-	-	Data belum tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		297.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	-	Data belum tersedia
		298.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	-	Data belum tersedia
		299.	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	504 Mitra Kerja	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		300.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{301}{375} \times 100\% = 80,27\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		311.	Persentase Peser KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{25.698}{89.497} \times 100\% = 28,71\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		312.	Pemerintah Daerah Kab/ kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	68 Pokja	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		313.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{7.086}{20.953} \times 100\% = 33,81\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		314.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	3 kecamatan	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		315.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{30.184}{238.581} \times 100\% = 12,65\%$	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
15	Perhubungan	316.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{2 \text{ lokasi}}{2 \text{ lokasi}} \times 100\% = 100\%$	Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026	-
		317.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{45.658}{50.095} \times 100\% = 91,14\%$	Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026	-
		318.	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{571}{708} \times 100\% = 80,64\%$	Dinas Perhubungan Bidang Angkutan dan Lalu lintas Jalan (LLAJ)	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		319.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kab atau Kota	$\frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perhubungan, Perjanjian Kinerja	-
16	Komunikasi dan Informatika	320.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		321.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		322.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tersedia, dokumen pendukung berupa screenshot dari channel youtube, facebook dan instagram	Dinas Kominfo	-
		323.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	-	-	Tidak ada kegiatan (event) yang diselenggarakan secara daring
		324.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{62}{56} \times 100\% = 110,71\%$	Dinas Kominfo	-
		325.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{45}{56} \times 100\% = 80,35\%$	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		326.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{107}{107} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		327.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		328.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Kominfo	Belum ada aplikasi yang didaftarkan ke PSE Kominfo RI
		329.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	-	Tidak ada layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan
		330.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{19}{56} \times 100\% = 33,93\%$	Dinas Kominfo	-
		331.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{19}{56} \times 100\% = 33,93\%$	Dinas Kominfo	-
		332.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	-	Tidak ada data Perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
		333.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{514}{514} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		334.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	$\frac{107}{56} \times 100\% = 191,07\%$	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		335.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{4}{15} \times 100\% = 26,67\%$	Dinas Kominfo	-
		336.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	Ada 2 : 1. Peraturan Walikota Nomor. 28 Tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan 2. Peraturan Walikota Nomor. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Penyelenggara Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	-
		337	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	-	-	Tidak ada komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi
		338	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	-	Tidak ada konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi
		339	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	-	Tidak ada diseminasi dan layanan informasi publik
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	340.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{0}{422} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		342.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Penerbitan Izin Tidak Pada Dinas Koperasi dan UKM, Tetapi di DPM-PTSP
		343.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	166 -----x 100% =19,88% 835	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-
		344.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	44 -----x 100% = 12,2% 360	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian & Perdagangan : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-
		345.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	305 -----x 100% =36,53% 835	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan & Pengembangan	-
		346.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	468 -----x 100% = 0,79% 58.606	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan & Pengembangan	-
		347.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	5 -----x 100% = 0,5% 1.375	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan & Pengembangan	-
		348.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Nihil	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi dan UKM Tidak Memberikan Fasilitasi Pembiayaan
		349.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0 -----x 100% = 11,48% 835	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		350.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Nihil	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pengembangan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Tidak Memberikan Fasilitasi Pembiayaan
		351.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Nihil	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pengembangan Koperasi	Tidak ada
		352.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0 -----x 100% = 0% 835	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pengembangan Koperasi	-
		353.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Nihil	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang Pengembangan Koperasi	Tidak Dianggarkan,
		354.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	415 -----x 100% = 1,08% 38.343	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
		355.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	25.301 -----x 100% = 65,98% 38.343	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
		356.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	70 -----x 100% = 0,18% 38.108	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
		357.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	235 -----x 100% = 0,62% 38.108	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		358.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	140 -----x 100% = 0,37% 38.203	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
		359.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1.023 -----x 100% = 2,67% 38.343	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
		360.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga Pendampingan	90 -----x 100% = 0,23% 38.343	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-
<b>18</b>	<b>Penanaman Modal</b>	361.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	-	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)	Rancangan Perda sudah masuk dalam Prolegda Tahun 2023 dan tinggal tunggu pembahasan untuk penetapan
		362.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPM-PTSP	SOP masih dalam proses permohonan eksaminasi ke Bagian Hukum
		363.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	DPM-PTSP	Perda belum disahkan
		364.	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	6 Kegiatan : 2 Bimbingan Teknis; 3 Talkshow; 1 Rapat Koordinasi dengan BKPM-RI	DPM-PTSP	-
		365.	Kegiatan pameran penanaman modal	8 Kegiatan : 4 Pameran; 1 Bisnis Forum; 3 Talkshow	DPM-PTSP	-
		366.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	-	-	Tidak tersedia data
		367.	Konsultasi perizinan dan non	5 laporan	DPM-PTSP	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		368.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	10.065 izin	DPM-PTSP	-
		369.	Laporan realisasi penanaman modal	1 laporan	BKPM	-
		370.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota	2 kali (Bimtek)	DPM-PTSP	-
		371.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1 laporan	BKPM	-
		372.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kab/kota	2 dokumen	DPM-PTSP	-
19	Pemuda dan Olah Raga	373.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	120 orang	Dispora	-
		374.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 (nol)	Dispora -	Tahun 2022 tidak ada bantuan hibah uang atau barang untuk wira usaha muda.
		375.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan	760 orang	Dispora	-
		376.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1.278 orang	Dispora; Kesbangpol	-
		377.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	68 orang	Dispora	-
		378.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	14 event	Dispora; KONI	-
		20	Statistik	379.	Tersedianya buku profil daerah	Tersedia
380.	Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan			1 survay : Survay Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Panggilan Darurat 112	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		381.	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang dilakukan	Ada 2 : 1) Pemetaan Social dan Kependudukan di Kota Medan; 2) Kegiatan Updating dan Processing Data Informasi Internal dan Eksternal (Bid. Kesehatan)	Dinas Kominfo	-
		382.	Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	-	Data belum tersdia
		383.	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	-	Data belum tersdia
		384.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
		385.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	-	-	Belum ada indicator yang berkaitan dengan hal ini
<b>21</b>	<b>Persandian</b>	386.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	-	Belum ada kegiatan strategis yang harus diamankan
		387.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip- prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	Sarana , Sim PKD, Sibisa, Sipandu, Smartwan
		388.	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{33}{56} \times 100\% = 58,93\%$	Dinas Kominfo : Aplikasi yang di Penetrasi Test	Sebanyak 33 OPD dari 56 OPD yang telah di Sterilisasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		389.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo	-
22	Kebudayaan	390.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<b>Inventarisasi: Seni</b> a. Tari : 88 b. Lukis : 18 c. Teater; 14 d. Music : 59 e. Patung 9 <b>Publikasi: 10</b> <b>Pemeliharaan :3</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Dokumen Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan	-
		391.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4 Kegiatan : - Lomba baca puisi - Tingkat SD dan SMP - Festival Tari Kreasi Seni Sumut - Fashion Show Busana Daerah Kota Medan - Tampilan Kesenian di Kesawan Citiwalk dan Istana Maimun	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		392.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	14 Etnis	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		393.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	188 Sanggar	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		394.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	- Pendaftaran = 95 - Pengkajian = 95 - Penetapan = 93 - Pemeringkatan = 93 - Penghapusan = 0	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		395.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	- Pemeliharaan = 7+2 (7 dana dari APBD & 2 dari dana pemilik) - Pemugaran = 1-	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		396.	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	-	Belum ada pendataan
		397.	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Adaptasi : 3 (Perubahan Fungsi)	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		398.	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Agama: 17 Sosial : 1 Pendidikan: 6 Ilmu Pengetahuan: 2 Teknologi :3 Kebudayaan: 1 Pariwisata: 2	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		399.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	7 Museum	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		400.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	2.423 orang	Dinas Kebudayaan : Museum Perkebunan Indonesia	-
		401.	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	2.423 orang	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Museum Perkebunan Indonesia	-
		402.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	8 museum	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Museum Perkebunan Indonesia	-
		403.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	8 orang	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : SK Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan No. 430/0724/SK/KBD/2019	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		404.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	5 orang	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : SK Walikota Medan No. 439/ 595.K/ XI/2018	-
		405.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : SK Walikota Medan No. 439/ 595.K/ XI/2018	-
		406.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	-	-	Belum ada pendataan
		407.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	-	Belum ada pendataan
		408.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Museum di Kelola: 8 Museum di amankan: 8 Museum di Kembangkan: 8 Museum di Manfaatkan: 8	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		409.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	3 Kegiatan	Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
23	Perpustakaan	410.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	101.864 ----- = 1 : 25 2.524.511	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		411.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	19.946 ----- x 100% = 0,79% 2.524.511	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		412.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.666 ----- = 1 : 2.515 2.524.511	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		413.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	9 ----- x 100% = 0.62% 1.459	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		414.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6 Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		415.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	6 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		416.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum ada pendataan
		417.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	500 exemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
24	Kearsipan	418.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{2.619}{2.619} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		419.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{141.810}{144.047} \times 100\% = 98,44\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		420.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{222}{222} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		421.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{0}{159.390} \times 100\% = 0,00\%$	-	Dalam Tahap Koordinasi dengan Pihak ANRI
		422.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		423.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Perwal
		424.	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		425.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		426.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum ada pendataan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		427.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
25	Kelautan dan Perikanan	428.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.836	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		429.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; UPT PPI	-
		430.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab/ kota yang diterbitkan	-	-	Tugas dan fungsi pelayanan ijin berada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		431.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi /dan penguatan kelembagaan)	- Peserta pelatihan melalui sekolah lapang jumlahnya 8 RTP (rumah tangga pembudidaya) dan 9 Kelompok - Peserta sosialisasi peningkatan kelembagaan jumlahnya 14 kelompok - Penerima bantuan sarana dan prasarana jumlahnya 29 kelompok	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		432.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jlh produksi benih air tawar : 3.275.900 ekor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
26	Pariwisata	433.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	8 Kawasan Heritage	Dinas Pariwisata	-
		434.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	-	Dinas Pariwisata	Belum ada dilakukan pendataan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		435	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) pariwisata per sub jenis usaha di kab/ kota	-	Bukan Kewenangan Dinas Pariwisata	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, maka Dinas Pariwisata tidak lagi mengeluarkan TDUP
		436	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	56.368 orang	Dinas Pariwisata : Bidang Pemasaran Pariwisata	-
		437	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6 event	Dinas Pariwisata : Bidang Pemasaran Pariwisata	-
		438	Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota	0	Dinas Pariwisata : Bidang Pemasaran Pariwisata	-
		439	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2.376 jenis usaha	Dinas Pariwisata	-
		440	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	225 pelaku usaha	Dinas Pariwisata	-
		441	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	546 pelaku usaha	Dinas Pariwisata	-
		442	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5.228 pelaku usaha	Dinas Pariwisata	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
27	Pertanian	443.	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima bantuan benih padi inpari 32 sebanyak 5 kelompok</li> <li>- Penerima bantuan alat pasca panen hortikultura sebanyak 3 kelompok</li> <li>- Penerima bantuan sarpras yg bersumber dari dana DBHC sebanyak 8 kelompok</li> <li>- Penerima bantuan sarpras yg bersumber dari dana DID sebanyak 24 kelompok</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		444.	Prasarana pertanian yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handsprayer : 7 Unit</li> <li>- Sapras Pasca Panen Roda 3 : 2 Buah</li> <li>- Cultivator : 5 Unit</li> <li>- Traktor Roda 4 : 1 Unit</li> </ul>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		445.	Penerbitan izin usaha pertanian	-		Data Tidak tersedia
		446.	Persentase prasarana yang digunakan	-		Data Tidak tersedia
		447.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	-		Data Tidak tersedia
		448.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	-		Data Tidak tersedia
28	Perdagangan	449.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	$\frac{577}{577} \times 100\% = 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		a	Pusat perbelanjaan	14 unit	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		b	Toko swalayan	563 unit	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		450.	Persentase penerbitan TDG	$\frac{94}{94} \times 100\% = 96,38\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		451.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	-	-	Data tidak tersedia
		452.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk	-	-	Data tidak tersedia
		a	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	-	-	Data tidak tersedia
		b	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	-	-	Data tidak tersedia
		c	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	-	Data tidak tersedia
		453.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan & pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		454.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Penerbitan SKA kewenangannya masih di Propinsi belum diserahkan ke Kota Medan
		455.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$\frac{53 \text{ Pasar}}{53 \text{ Pasar}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan; PD Pasar	-
		456.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-	-	Data tidak tersedia
		457.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	-	Data tidak tersedia
		458.	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{21.211}{26.166} \times 100\% = 81,06\%$	SIMPEL (System Pelaporan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi)	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		459.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Kegiatan tdk terlaksana krn tdk tertampung dlm anggaran
29	Perindustrian	460.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Menurut data di OSS tidak ada yang mengajukan permohonan izin
		461.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50% : Naskah akademik dan Draft Ranperda telah tersusun	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		462.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$	DPM-PTSP	-
		463.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	One Submission Single (OSS)	Menurut data di OSS tidak ada yang mengajukan permohonan izin
		464.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	$\frac{231}{4.742} \times 100\% = 4,87\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan ; Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sesuai dengan konsep tersebut maka indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau Outcome akan menunjukkan pencapaian kinerja berupa kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai setidaknya pada suatu rentang waktu/periode tertentu. Capaian atas kondisi dimaksud bergantung kepada atau merupakan fungsi dari output yang dihasilkan atas kegiatan tertentu.

Jenis indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau Outcome disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah indikator

yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau Outcome untuk tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)  
Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	66.811 -----x 100% = 84,37% 79.189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Dapodik, Emis	-
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	267.212 -----x 100% =101,49% 263.274	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik, Emis	-
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	138.707 -----x 100% = 102,91% 134.718	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik, Emis	-
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	8.252 ----- x 100% = 94,87% 8.698	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Dapodik	-
2	Kesehatan	5.	Rasio daya tamping Rumah Sakit (RS) Rujukan	6.285 -----x 100% = 0,25% 2.528.065	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		6.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	53 ----- x 100% = 75,71% 70	Dinas Kesehatan : Bidang Yankes	-
		7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	34.658 ----- x 100% = 91,30% 37.959	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan	34.285 -----x 100% = 94,62% 36.234	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	34.285 -----x 100% = 99,35% 34.508	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	140.935 -----x 100% = 84,42% 166.943	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	168.653 -----x 100% = 47,53% 354.866	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{69.387}{1.817.252} \times 100\% = 3,82\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{160.345}{203.974} \times 100\% = 78,61\%$	Dinas Kesehatan : Bidang Kesmas	-
		14.	Persentase penderita hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{26.176}{457.270} \times 100\% = 5,72\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{8.902}{38.823} \times 100\% = 22,93\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{2.311}{3.263} \times 100\% = 70,82\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{26.049}{93.283} \times 100\% = 27,92\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
		18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{24.470}{73.111} \times 100\% = 33,46\%$	Dinas Kesehatan : Bidang P2P	-
3	Pekerjaan Umum	19.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDA, BM,BK)	-
		20.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas SDA, BM,BK	-
		21.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas SDA, BM,BK	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		22.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{377.860}{414.509} \times 100\% = 91,16\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya & Tata Ruang (PKP,CK,TR )	-
		23.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{387.481}{414.509} \times 100\% = 93,48\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		24.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{528}{1.117} \times 100\% = 47,27\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		25.	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{3.083,71}{3.279,50} \times 100\% = 98,03\%$	Dinas Sumber Daya Alam, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDA, BM,BK)	-
		26.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{444}{800} \times 100\% = 55,50\%$	Dinas SDA, BM,BK	-
		27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{754}{754} \times 100\% = 100\%$	Dinas SDA, BM,BK	-
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>	28.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		29.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{176}{573} \times 100\% = 30,72\%$	Dinas PKP,CK,TR	-
		30.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{59.57}{506.60} \times 100\% = 11,76\%$	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-
		31.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{79.407}{414.509} \times 100\% = 19,15\%$	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-
		32.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{9.349}{9.349} \times 100\% = 100\%$	- Dinas PKP,CK,TR - KOTAKU	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	51 -----x 100% = 100% 51	Satuan Polisi Pamong Prafraja (Satpol-PP)	-
		34.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	26 -----x 100% = 100% 26	Satpol PP	-
		35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	655.675 -----x 100% = 100% 655.675	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	-
		36.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	443.013 -----x 100% = 58,23% 760.736	BPBD	-
		37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	53.451 -----x 100% = 100% 53.451	BPBD	-
		38.	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	172 -----x 100% = 78,89% 218	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota (DPK-PK)	-
		39.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	11,48 menit	DPK-PK	-
6	Sosial	40.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5.124 -----x 100% = 86,37% 5.932	Dinas Sosial	-
		41.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	12.046 -----x 100% = 100% 12.046	Dinas Sosial	-
7	Tenaga Kerja	42.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0 -----x 100% = 0% 1	Dinas Tenaga Kerja : Subbag Penyusunan Program	RTKD yang lalu sudah berakhir sekarang masih dalam tahap penyusunan
		43.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1.683 -----x 100% = 0,16% 1.031.769	Dinas Tenaga Kerja Subbag Sertifikasi : Medan Dalam Angka;	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		44.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	165.120.010.000.000 ----- x 1 1.031.769 = Rp 160,03 juta	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Produktivitas Tenaga Kerja & Pemagangan	-
		45.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12.120 -----x 100% = 96,65% 12.539	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Kelembagaan, Pengupahan, Syarat Kerja, Jaminan Sosial dan Purna Kerja	-
		46.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota	1.870 -----x 100% = 64,70% 2.890	Dinas Tenaga Kerja : Seksi Informasi Pasar Kerja	-
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5.914.181.854.454 -----x 100% =87,98% 6.722.198.862.230	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A, PM dan PP-KB) :	-
		48.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/Kota	146 -----x 100% = 98,65% 148	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
		49.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	51 -----x 100.000 = 5,94 858.197	Dinas P3A, PM dan PP-KB : APLIKASI SIMFONI PPA	-
9	Pangan	50.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100 -----x 100% = 44,14% 226.56	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
10	Pertanahan	51.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 -----x 100% = 0% 0	Dinas PKP,CK,TR	-
		52.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	12 Lokasi -----x 100% = 63.16% 19 Lokasi	Dinas PKP,CK,TR	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		53.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0 -----x 100% = 0% 0	Dinas PKP,CK,TR	Pelayanan penerbitan KKPR merupakan kewenangan tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/ BPN.
		54.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 -----x 100% = 0% 0	Dinas PKP,CK,TR	Data Tanah Obyek Landreform (TOL) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q.Kementerian PU-PR
		55.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 -----x 100% = 0% 0	Dinas PKP,CK,TR	Data tanah untuk masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Pusat c.q.Kementerian PU-PR
		56.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 -----x 100% = 0% 0	Dinas PKP,CK,TR	Penangan sengketa tanah garapan belum pernah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
11	Lingkungan Hidup	57.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKA = 25,70 ; IKU = 30,73 ; IKL = 5,46 IKLH = 25,70 + 30,73 + 5,46 = 61,89	Dinas Lingkungan Hidup	-
		58.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	564.290 Ton/Thn -----x 100% = 82,06% 687.660 Ton/Thn	Dinas Lingkungan Hidup	-
		59.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	28 ----- x 100% = 6,48% 432	Dinas Lingkungan Hidup	-
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	1.774.597 -----x 100% = 94,53% 1.877.312	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	244.151 -----x 100% = 37,36% 653.487	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		62	Kepemilikan akta kelahiran	605.720 -----x 100% = 90,90% 666.339	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13 -----x 100% = 36,11% 36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1 -----x 100% = 100% 1	Dinas P3A, PM dan PP-KB	Tidak ada desa di kota medan
		65.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1 -----x 100% = 100% 1	Dinas P3A, PM dan PP-KB	Tidak ada desa di kota medan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01	BPS ; Dinas P3A, PM dan PP-KB	Data TFR kota Medan masih mengacu kepada hasil Susenas 2019
		67.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	138.770 -----x 100% = 61,93% 224.075	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
		68.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	14.260 -----x 100% = 6,36% 224.075	Dinas P3A, PM dan PP-KB	-
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kab/Kota	0,65	Dinas Perhubungan : Bid. Lalu Lintas & Angkuan Jalan	-
		70.	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,74	Dinas Perhubungan : Bid. Lalu Lintas & Angkuan Jalan	-
16	Komunikasi dan Informatika	71.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56 -----x 100% = 100% 56	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		72.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12 -----x 100% = 46,15% 26	Dinas Kominfo	-
		73.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.942.157 -----x 100% = 76,82% 2.528.065	Dinas Kominfo	-
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	96 -----x 100% = 11,49% 835	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang Koperasi	Tidak tersedia
		75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	415 -----x 100% = 1,08% 38.343	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : Bidang UMKM	-
18	Penanaman Modal	76.	Persentase peningkatan investasi di Kab /Kota	-1.825.406.790.503 -----x 100% = -30,65% 5.956.081.391.170	DPM-PTSP; BKPM RI	-
19	Keperguruan dan Olah Raga	77.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4.865 -----x 100% = 0,77% 629.951	Dispora dan Disdukcapil	-
		78.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.236 -----x 100% = 0,85% 629.951	Disdukcapil	Tidak ada data karena terdapat terjadi multi kepemimpinan KNPI Kota Medan
		79.	Peningkatan Prestasi Olahraga	49 medali	Dispora : Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pembudayaan Olahraga	-
20	Statistik	80.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	56 -----x 100% = 100% 56	Dinas Kominfo	-
		81.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	56 -----x 100% = 100% 56	Dinas Kominfo	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
21	Persandian	82.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{0}{645} \times 100\% = 0\%$	Dinas Kominfo	-
22	Kebudayaan	83.	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{93}{421} \times 100\% = 22,09\%$	Dinas Kebudayaan : SK Walikota Medan No. 433/28.K/ X/ 2021	-
23	Perpustakaan	84.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Hasil Survey Perpustakaan Nasional RI Tahun 2022	-
		85.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{(0,0018 + 0,8276 + 0,0000 + 0,5957 + 3,0116 + 0,4781 + 0,4436)}{7} = 76,55$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Hasil Survey Perpustakaan Nasional RI Tahun 2022	-
24	Kearsipan	86.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$(100 + 98,44 + 100 + 0)/4 = 74,61$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		87.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$(100 + 100 + 100 + 100 + 0+100)/6 = 83,33$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
25	Kelautan dan Perikanan	88-	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{123.473}{146.145} \times 100\% = 84,48\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
26	Pariwisata	89.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{44.636}{11.732} \times 100\% = 340,464\%$	Dinas Pariwisata	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		90.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	160.398 -----x 100% =100,93 % 158.917	Dinas Pariwisata	-
		91.	Tingkat Hunian Akomodasi	268.938 -----x 100% = 26,16 % 1.028.205	Dinas Pariwisata	-
		92.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (PDRB-ADHB)	7.454,45 -----x 100% = 2,66% 280.159,04	Dinas Pariwisata	-
		93.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	465.056.381.222 -----x 100% =23,53% 1.976,235.644.848	Dinas Pariwisata	-
27	Pertanian	94.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	11.400 ton -----x 1 = 6,19 ton/ha 1.842 ha	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		95a.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus Rabies)	295/8 = 3678,5 %	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
28	Perdagangan	96.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	577 -----x 100% = 100% 577	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)	-
		97-	Persentase kinerja realisasi pupuk	450,5 -----x 100% =79,59% 566	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
		98.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	21.211 ----- x 100% =81,06% 26.166	SIMPEL (System Pelaporan Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi)	-
29	Perindustrian	99-	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	8.212 -1.247 -----x 100% = 558,54% 1.247	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan : DPM-PTSP	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		100.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	-
		101-	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{288}{4.524} \times 100\% = 6,36\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan ; DPM-PTSP	-
		102-	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Di OSS tidak ada data yang mengajukan permohonan izin
		103.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	Di OSS tidak ada data yang mengajukan permohonan izin
		104.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri : $50\% + 25\% + 0\% = 75\%$ Kelengkapan informasi industri : $10\% + 10\% = 20\%$ Nilai akhir = $75\% + 20\% = 95\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan: Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-

### 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang merupakan jenis indikator yang diarahkan untuk menunjang dan mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tertentu agar berjalan dengan baik. Diharapkan dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap tercapainya target yang ditetapkan terutama berkaitan dengan indikator kinerja kunci (IKK) Keluaran atau Output dan indikator kinerja kunci (IKK) Hasil atau Outcome

Jenis indikator kinerja kunci (IKK) Fungsi Penunjang diarahkan sesuai dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang, dengan jumlah indikator yang berbeda-beda. Capaian yang diraih Pemerintah Kota Medan atas indikator kinerja kunci (IKK) Fungsi Penunjang untuk tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang  
Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (Rp)	$\frac{1.418.724.042.816}{6.722.198.862.230} \times 100\% = 21,10\%$	BPKAD	-
		2.	Rasio PAD (Rp miliar)	$\frac{2.230.554.495.746}{3.050.594.560.414} \times 100\% = 73,12\%$	BPKAD	-
		3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	-
		4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	-
		5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{4.217.877.534.921}{6.047.157.488.152} \times 100\% = 69,75\%$	BPKAD	-
		6.	Opini Laporan Keuangan	-	BPKAD	Masih dalam proses
2.	Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{335} \times 100\% = 0\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		8.	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	$\frac{335}{4736} \times 100\% = 7,07\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		9.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{3.986.383.691.672}{6.028.939.024.792} \times 100\% = 66,121\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
		10.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{1.758145931047,5}{58.895.508.424} \times 100\% = 2985,195\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak tersedia

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
3.	Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	11.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4.315 -----x 100% = 352,2% 1.225	BKD-PSDM	-
		12.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	734 -----x 100% = 13,25% 5.540	BKD-PSDM	-
		13.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	390 -----x 100% = 53,13% 734	BKD-PSDM	-
4.	Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	14.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6.047.157.448.152 -----x 100% = 89,96% 6.722.198.862.230	BPKAD	-
		15.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2.230.554.495.748 -----x 100% = 104,27% 2.139.239.994.347	BPKAD	-
		16.	Assets Management	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPKAD	-
		17.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	548.558.857.631 -----x 100% = 9,57% 5.731.395.062.275	BPKAD	-
5.	Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	18.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	56 -----x 100% = 100% 56	Dinas Kominfo	-
		19.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	10 -----x 100% = 100% 10	Dinas Kominfo	-

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Pemerintah Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Medan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya, Pemerintah Kota Medan melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut.

### 2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan daerah sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis pada Table 2.5. berikut

Tabel 2.5.

Target Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban umum	Persen	70
3	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	3.05
4	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	97.9
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB
6	Gini Ratio	Indeks	0.32

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81.62
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.54
9	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi oleh Perda/Perwal	Unit	132
10	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di Revitalisasi	Kawasan	3
11	Indesk Pendidikan	Indeks	13.08
12	Indeks Kesehatan	Indeks	74.10
13	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	23,000
14	Persentase Luasan RTH	Persen	12.5
15	Indesk Kepuasan Masyarakat	Indeks	BB
16	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0.92
17	Opini BPK	-	WTP
18	Nilai SAKIP	Kategori/ Nilai	B
19	Pendapatan Per Kapita	Rupiah	68,500,000
20	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	15,181,000
21	Luas Kawasan Permukiman Layak huni	Ha	25,857.56
22	Nilai Investasi PMDN	Rp Juta	4,550,721.56
23	Nilai Investasi PMA	US\$	44,385.00
24	Angka Kemiskinan	Persen	7.62
25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62.5

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.5. di atas dapat dilihat bahwa sesuai dengan perjanjian kinerja terdapat 25 indikator kinerja pada tahun 2022. Secara umum indikator kinerja tersebut mengarah kepada sasaran-sasaran yang terkait kepada bidang perekonomian, social, kesehatan, ketenagakerjaan, investasi, dan kesejahteraan rakyat.

### **2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja**

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut

Tabel 2.6.

## Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60	61.89
2	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	Persen	70	41.91
3	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	3.05	2.66
4	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	97.9	98.41
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	CC
6	Gini Ratio	Indeks	0.32	0.399
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81.62	81.76
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.54	4.71
9	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	Unit	132	93
10	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	3	2
11	Indesk Pendidikan	Indeks	13.08	11.50
12	Indeks Kesehatan	Indeks	74.10	73.58
13	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	23,000	20,330
14	Persentase Luasan RTH	Persen	12.5	6.73
15	Indesk Kepuasan Masyarakat	Indeks	BB	B
16	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0.92	0.83
17	Opini BPK	-	WTP	Dalam proses
18	Nilai SAKIP	Kategori/Nilai	B	B
19	Pendapatan Per Kapita	Rp juta	68.50	69,19
20	Pengeluaran Per Kapita	Rp juta	15.18	15.50
21	Luas Kawasan Permukiman Layak huni	Ha	25,857.56	27,715.97
22	Nilai investasi PMDN	Rp Juta	4,550,721.56	3.540.373
23	Nilai Investasi PMA	US\$	44,385.00	41,136.00
24	Angka Kemiskinan	Persen	7.62	8.07
25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62.5	44.04

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.6. di atas dapat dilihat bahwa dari 25 indikator kinerja yang ditetapkan, beberapa diantaranya telah berada pada kisaran atau mencapai target. Dengan membandingkan antara target dan realisasi diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator yang telah atau sudah

mencapai target, antara lain IPM, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan relative masih rendah yaitu sebesar 44%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah dicapai beberapa perbaikan, namun masih perlu kerja keras agar capaian atas beberapa indikator lainnya dapat sesuai atau mampu melampaui dengan target yang telah ditetapkan.

### 2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (2021) diuraikan pada Tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.7.

Capaian/Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,03	61.89
2	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	Persen	70,00	41.91
3	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	2,57	2.66
4	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	98,09	98.41
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	CC
6	Gini Ratio	Indeks	0,402	0.399
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,21	81.76
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,62	4.71
9	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	Unit	93	93
10	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	3	2
11	Indesk Pendidikan	Indeks	11,42	11.50
12	Indeks Kesehatan	Indeks	73,23	73.58
13	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	35.000	20,330
14	Persentase Luasan RTH	Persen	6,73	6.73
15	Indesk Kepuasan Masyarakat	Indeks	CC	B
16	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0,80	0.83
17	Opini BPK	-	WTP	Dalam proses
18	Nilai SAKIP	Kategori/ Nilai	B	B
19	Pendapatan Per Kapita	Rp juta	63.31	66.19
20	Pengeluaran Per Kapita	Rp juta	14.99	15.50
21	Luas Kawasan Permukiman Layak huni	Ha	26.003,40	27,715.97
22	Nilai investasi PMDN	Rp Juta	5.121.015,30	3,540,373.00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
23	Nilai Investasi PMA	US\$	57,196.30	41,136.00
24	Angka Kemiskinan	Persen	8,34	8.07
25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	27,98	44.04

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.7. di atas tampak bahwa dari 25 indikator kinerja, beberapa indikator kinerja telah mengalami perbaikan/peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) indikator yang mengalami perbaikan/peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa capaian atas indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2022 yang berhasil diraih Pemko Medan relative lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021, dengan tingkat capaian berkisar 68,00 persen.

#### **2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)**

Analisis capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2022 dibandingkan target yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diuraikan pada Tabel 2.8. berikut

Tabel 2.8.

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemko Medan dan Target dalam RPJMD Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61.89	60
2	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	Persen	41.91	70
3	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	2.66	3.05
4	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	98.41	97.9
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	BB
6	Gini Ratio	Indeks	0.399	0.32
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81.76	81.62
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.71	3.54
9	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	Unit	93	132
10	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	2	3
11	Indesk Pendidikan	Indeks	11.50	13.08
12	Indeks Kesehatan	Indeks	73.58	74.10
13	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	20,330	23,000

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
14	Persentase Luasan RTH	Persen	6.73	12.5
15	Indesk Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	BB
16	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0.83	0.92
17	Opini BPK	-	Dalam proses	WTP
18	Nilai SAKIP	Kategori/ Nilai	B	B
19	Pendapatan Per Kapita	Rp juta	66.19	68.50
20	Pengeluaran Per Kapita	Rp juta	15.50	15.18
21	Luas Kawasan Permukiman Layak huni	Ha	27,715.97	25,857.56
22	Nilai investasi PMDN	Rp Juta	3,540,373.00	4,550,721.56
23	Nilai Investasi PMA	US\$	41,136.00	44,385.00
24	Angka Kemiskinan	Persen	8.07	7,62
25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	44.04	62,5

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.8. di atas diketahui bahwa dari 25 indikator kinerja pada RPJMD 2021-2026, beberapa diantaranya telah tercapai, juga terdapat beberapa telah melampaui target, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Luas dan Persentase Pemukiman Layak Huni serta Pendapatan Per Kapita. Proporsi indikator yang telah tercapai dan telah melampaui target capaian relative masih kecil yaitu sebesar 28%. Dengan demikian secara umum tingkat capaian yang diraih atas indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 relatif masih kecil dengan persentase capaian berkisar 28 persen

### **2.3.5. Analisis Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai-**

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai dalam Tahun 2022 diuraikan dengan membandingkan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja untuk program berkaitan dengan kinerja yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut

Tabel 2.9.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Medan Sesuai dengan Kinerja yang Ditetapkan (Tapkin) Tahun Anggaran 2022 (rupiah)

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN &amp; KEBUDAYAAN</b>	<b>549.882.925.526</b>	<b>501.494.747.632</b>	<b>91,20%</b>
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	538.078.340.674	434.225.667.232	80,70%
1.2	Program Pengembangan Kurikulum	287.895.600	0	0%
1.3	Program Tendidik dan Tenaga Kependidikan	67.765.055.968	55.848.167.000	82,41%
1.4	Program Pengembangan Kebudayaan	3.137.835.000	3.121.423.400	99,48%
1.5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	3.906.066.184	3.865.348.300	98,96%
1.6	Program Pembinaan Sejarah	1.122.788.000	1.115.763.200	99,37%
1.7	Program Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya	3.290.000.000	3.258.428.500	99,04%
1.8	Program Pengelolaan Permuseuman	60.000.000	59.950.000	99,92%
<b>2</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>410.101.221.308</b>	<b>376.062.275.855</b>	<b>91,70%</b>
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	407.516.392.388	374.184.438.495	91,82%
2.2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	522.940.000	444.038.110	84,91%
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	288.860.000	119.850.000	41,49%
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.773.028.920	1.313.949.250	88,54%
<b>3</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	<b>1.172.802.657.240</b>	<b>736.590.474.963</b>	<b>62,81%</b>
3.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.000.000.000	940.286.600	94,03%
3.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	563.501.007.306	409.350.142.165	72,64%
3.3	Program Penyelenggaraan Jalan	606.305.139.934	324.575.033.248	53,53%
3.4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.996.510.000	1.725.012.950	86,40%
<b>4</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>98.530.025.396</b>	<b>89.771.658.525</b>	<b>91,11%</b>
4.1	Program Pemberdayaan Sosial	84.631.958.335	79.931.203.535	94,45%
4.2	Program Rehabilitasi Sosial	4.639.629.300	3.268.539.694	70,45%
4.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.932.870.240	4.499.848.716	75,85%
4.4	Program Penanganan Bencana	3.325.567.521	2.072.066.580	62,31%
<b>5</b>	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>	<b>4.965.434.650</b>	<b>4.125.736.140</b>	<b>83,09%</b>
5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	863.522.450	668.510.263	77,42%
5.2	Program Hubungan Industrial	1.615.966.500	1.570.424.050	97,18%
5.3	Program Pelatihan Kerja & Produktifitas Tenaga Kerja	2.485.945.700	1.886.801.827	75,09%
<b>6</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>90.409.252.776</b>	<b>86.227.274.990</b>	<b>95,37%</b>
6.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	196.789.000	3.200.000	1,63%
6.2	Program Pengendalian Pencemaran	6.343.550.200	5.813.454.600	91,64%

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
6.3	Program Pengelolaan Persampahan	21.751.055.068	21.075.754.709	96,89%
6.4-	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional	13.329.903.449	10.619.164.650	79,66%
6.5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	53.000.874.259	46.857.855.556	88,41%
6.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	113.380.000	103.274.000	91,09%
6.7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.280.240.000	1.223.190.975	95,54%
6.8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133.648.000	116.284.000	87,19%%
6.9	Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	327.371.000	153.110.000	46,77%
6.10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	255.992.000	243.086.500	94,96%
6.11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	18.900.000	94,50%
<b>7</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>89.403.823.974</b>	<b>77.637.749.401</b>	<b>86,84%</b>
7.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	89.403.823.974	77.637.749.401	86,84%
<b>8</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>4,560,993,700</b>	<b>3,348,818,270</b>	<b>73,42%</b>
8.1	Program Penguatan Idiologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	1.371.869.000	1.037.777.970	75,65%
8.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	458.694.200	329.809.500	71,90%
8.3	Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	327.696.000	252.149.000	76,95%
8.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya	828.642.000	559.630.800	67,54%
8.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas & Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.574.092.500	1.169.451.000	74,29%
<b>9</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN &amp; PERIKANAN</b>	<b>31,510,381,983</b>	<b>28,944,239,227</b>	<b>91,86%</b>
9.1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4.009.899.432	3,909,496,024	97,49%
9.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.332.867.740	3.278.310.462	98,36%
9.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.700.003.100	1.666.808.394	98,05%

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9.4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.584.214.908	4.420.694.580	79,16%
9.5-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.329.196.932	5.009.082.790	93,99%
9.6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.958.447.190	3.855.044.975	97,39%
9.7	Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian	3.440.795.563	3.232.133.960	93,94%
9.8	Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian	1.131.706.090	1.076.434.500	95,12%
9.9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.519.522.348	1.268.528.969	83,48%
9.10	Program Perizinan Usaha Pertanian	124.004.000	62.869.580	50,70%
9.11	Program Penyuluhan Pertanian	524.851.230	407.673.743	77,67%
9.12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	854.873.450	757.161.250	88,57%
<b>10</b>	<b>DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>40,499,207,068</b>	<b>36,739,316,488</b>	<b>90,72%</b>
10.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	853.250.000	744.098.401	87,21%
10.2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.165.861.600	1.147.559.800	98,43%
10.3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	369.327.600	321.372.600	87,02%
10.4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	324.991.800	323.315.800	99,48%
10.5	Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi	288.101.000	287.901.000	99,93%
10.6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)	6.411.365.160	5.823.863.000	90,84%
10.7	Program Pengembangan UMKM	18.757.882.466	10.091.294.555	53,79%
10.8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	130.520.000	115.160.000	88,23%
10.9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	87.270.000	77.958.250	89,33%
10.10	Program Perencanaan & Pembangunan Industri	3.900.839.619	3,749,249,085	96,11%
10.11	Program Perizinan & Pendaftaran Perusahaan	418.934.250	138.750.000	33,12%
10.12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	177.068.282	100.740.988	56,89%
10.13	Program Pengembangan Ekspor	3.559.152.635	2.697.454.241	75,79%
10.14	Program Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.102.474.968	1.115.925.800	53,08%
10.15	Program Standarisasi & Perlindungan Konsumen	1.021.134.400	919.269.500	90,02%
10.16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	9.310.335.288	9.085.403.468	97,58%
<b>11</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b>	<b>5,041,157,046</b>	<b>3,493,214,693</b>	<b>69,29%</b>
11.1	Program Promosi Penanaman Modal	1.498.565.600	1.247.179.476	83,22%

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.500.000	5.660.000	6,18%
11.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	549.735.110	280.072.418	50,95%
11.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.714.766.336	1.184.817.799	69,09%
11.5	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	1.186.590.000	775.485.000	65,35%
<b>12</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>34.746.452.286</b>	<b>33.043.445.190</b>	<b>95,09%</b>
12.1	Program Peningkatan Ketentraman & Ketertiban Umum	34.746.452.286	33.043.445.190	95,09%
<b>13</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>13.707,050,000</b>	<b>11,279,278,359</b>	<b>82,28%</b>
13.1	Program Pemasaran Pariwisata	9,807,520,000	8.131,320,708	82,91%
13.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828.340.000	552.135.000	66,66%
13.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	232.630.000	113.615.800	48,84%
13.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.838.560.000	2.482.206.851	87,45%
<b>14</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK &amp; KELUARGA BERENCANA</b>	<b>25,507,161,400</b>	<b>19,480,960,761</b>	<b>76,37%</b>
14.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, & Masyarakat Hukum Adat	8.476.404.600	7.889.531.936	93,08%
14.2	Program Pengendalian Penduduk	419.157.500	318.624.200	76,02%
14.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.202.136.100	5.361.346.770	86,44%
14.4	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera	8.559.058.300	4.612.358.440	53,89%
14.5	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	237.400.300	207.681.778	87,48%
14.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	64.484.000	52.593.500	81,56%
14.7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak	179.035.500	146.126.000	81,62%
14.8	Program Pemenuhan Hak Anak	539.656.000	467.595.200	86,65%
14.9	Program Perlindungan Perempuan-	171.078.600	86.144.100	50,35%
14.10	Program Perlindungan Khusus Anak-	658.750.500	338.958.837	51,45%
<b>15</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN &amp; PANCATATAN SIPIL</b>	<b>3,798,304,395</b>	<b>3,720,417,415</b>	<b>97,95%</b>
15.1	Program Pendaftaran Penduduk	1.820.001.600	1.789.395.550	98,32%
15.2	Program Pencatatan Sipil	454.338.600	450.087.400	99,06%
15.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.523.964.195	1.480.934.465	91,18%
<b>16</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.107.296.715</b>	<b>7.889.224.450</b>	<b>65,16%</b>
16.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.107.296.715	7.889.224.450	65,16%

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
17	<b>BADAN KEPEGAWAIAN &amp; PENGEMBANGAN SDM</b>	<b>12,859,198,000</b>	<b>11,911,640,998</b>	<b>92,63%</b>
17.1	Program Kepegawaian Daerah	8.241.238.600	7.354.081.100	89,23%
17.2	Program Pengembangan SDM	4.617.959.400	4.557.559.898	98,69%
18	<b>BADAN KEUANGAN &amp; ASET DAERAH</b>	<b>76,391,375,043</b>	<b>36,434,319,249</b>	<b>47,69%</b>
18.1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.258.600.000	6.343.661.217	76,81%
18.2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	68.132.775.043	30.090.658.032	44,16%
19	<b>DINAS KOMUNIKASI &amp; INFORMATIKA</b>	<b>27,537,276,600</b>	<b>26,422,885,551</b>	<b>95,95%</b>
19.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	339.300.000	336.600.000	99,20%
19.2	Program Aplikasi Informatika	12.103.950.800	11.228.419.000	92,77%
19.3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	14.572.525.800	14.394.427.289	97,78%
19.4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	521.500.000	463.439.262	88,87%
20	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN &amp; PENYELAMATAN KOTA</b>	<b>12.494.040.280</b>	<b>11.807.679.374</b>	<b>94,51%</b>
20.1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran	12.494.040.280	11.807.679.374	94,51%
21	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>23,900,968,260</b>	<b>16,346,064,738</b>	<b>68,39%</b>
21.1	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	19.050.589.520	12.733.063.048	66,84%
21.2	Program Perekonomian & Pembangunan	4.850.378.740	3.613.001.690	74,49%
22	<b>DINAS PERPUSTAKAAN &amp; KEARSIPAN</b>	<b>3,176,208,268</b>	<b>2,386,451,210</b>	<b>75,14%</b>
22.1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.186.198.148	1.640.602.282	75,04%
22.2	Program Pengelolaan Arsip	583.917.700	510.566.249	87,44%
22.3	Program Perlindungan & Penyelamatan Arsip	182.763.020	65.966.300	36,09%
22.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	117.455.000	86.362.379	73,53%
22.5	Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno	105.874.400	82.954.000	78,35%
23	<b>BADAN PERENCANAAN &amp; PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>12,351,516,175</b>	<b>11,379,921,060</b>	<b>92,13%</b>
23.1	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	4.512.453.175	3.961.552.000	87,79%
23.2	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan & Pembangunan Daerah	7.839.063.000	7.418.369.060	94,63%
24	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>9,809,995,400</b>	<b>6,435,336,800</b>	<b>65,60%</b>
24.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.476.520.000	5.351.848.750	71,58%
24.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	2.333.475.400	1.083.488.050	46,43%
25	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>10.686.083.808</b>	<b>9.919.718.335</b>	<b>92,93%</b>
25.1	Program Penanggulangan Bencana	10.686.083.808	9.919.718.335	92,93%
26	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>3.396.545.000</b>	<b>2.296.136.000</b>	<b>67,60%</b>

No	OPD-PROGRAM	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Serapan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
26.1	Program Penelitian & Pengembangan	3.396.545.000	2.296.136.000	67,60%
27	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>22,904,619,792</b>	<b>9,748,517,850</b>	<b>86,22%</b>
27.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.326.244.042	17.529.217.850	86,24%
27.2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	280.204.800	236.015.000	84,23%
27.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.298.170.950	1.983.285.000	86,30%
	<b>JUMLAH</b>	<b>715,187,979,540</b>	<b>602,348,137,317</b>	<b>84,22%</b>

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Tabel 2.9. di atas tampak bahwa secara keseluruhan realisasi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai adalah sebesar 84,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dengan capaian hasil kinerja tahun anggaran 2022 tetap mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah, termasuk akuntabilitasnya

### 2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2022 diuraikan pada tabel 2.10. berikut

Tabel 2.10.

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan)
1.2	Program Pengembangan Kurikulum
	a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	b. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1.3	Program Pendidik & Tenaga Kependidikan
	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	b. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	c. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.4	Program Pengembangan Kebudayaan
	a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
1.5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.6	Program Pembinaan Sejarah
	a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
1.7	Program Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya
	a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	b. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
1.8	Program Pengelolaan Permuseuman
	a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
	b. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	a. Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
2.2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
	a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman
	a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
3.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.2	Program Penyelenggaraan Jalan
	a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
3.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
<b>4</b>	<b>Dinas Sosial</b>
4.1	Program Pemberdayaan Sosial
	a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4.2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.3	Program Rehabilitasi Sosial
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4.4	Program Penanganan Bencana
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
<b>5</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>
5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja
	a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	d. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.2	Program Hubungan Industrial
	a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
5.3	Program Pelatihan Kerja & Produktifitas Tenaga Kerja
	a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
<b>6</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
6.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
	b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
	c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota
6.3	Program Pengelolaan Persampahan
	a. Pengelolaan Sampah
6.4	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional
	a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
6.5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
	a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
6.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
6.8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
6.9	Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
<b>7</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
7.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>8</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
8.1	Program Penguatan Idiologi Pancasila & Karakter Kebangsaan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.3	Program Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas & Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	a. Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
<b>9</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian &amp; Perikanan</b>
9.1	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
9.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
9.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9.4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Kecukupan Gizi
9.5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
9.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
<b>10-</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian &amp; Perdagangan</b>
10.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasian
	a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
10.4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasian
	a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10.5	Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi
	a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)
	a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
10.7	Program Pengembangan UMKM
	a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
10.8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
10.9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
10.10	Program Perizinan & Pendaftaran Perusahaan
	a. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya & Pengawasan Distribusi, Pengemasan & Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab./Kota
10.11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	a. Pembangunan & Pengelolaan Saran Distribusi Perdagangan
10.12	Program Pengembangan Ekspor
	a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang & Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah Kab./Kota
10.13	Program Penggunaan & Pemasaran Produk Dalam Negeri
	a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran & Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
10.14	Program Perencanaan & Pembangunan Industri

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
10.15	Program Standarisasi & Perlindungan Konsumen
	a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang & Pengawasan
10.16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	a. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
<b>11</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>
11.1	Program Promosi Penanaman Modal
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11.2	Program Pelayanan Penanaman Modal
	a. Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
11.5	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal
	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>12</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
12.1	Program Peningkatan Ketentraman & Ketertiban Umum
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
<b>13</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>
13.1	Program Pemasaran Pariwisata
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
13.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
13.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
13.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
<b>14</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk &amp; Keluarga Berencana</b>
14.1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, & Masyarakat Hukum Adat
	a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
14.2	Program Pengendalian Penduduk
	a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
14.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana
	a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
14.4	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
	a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
14.5	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan
	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
14.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	a. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender & Anak
	a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.8	Program Pemenuhan Hak Anak
	a. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
14.9	Program Perlindungan Perempuan
	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
14.10	Program Perlindungan Khusus Anak
	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
<b>15</b>	<b>Dinas Kependudukan &amp; Pencatatan Sipil</b>
15.1	Program Pendaftaran Penduduk
	a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
15.2	Program Pencatatan Sipil
	a. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
15.3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>16</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
16.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>17</b>	<b>Badan Kepegawaian &amp; Pengembangan SDM</b>
17.1	Program Kepegawaian Daerah
	a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	b. Mutasi dan Promosi ASN
	c. Pengembangan Kompetensi ASN
	d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
17.2	Program Pengembangan SDM
	a. Pengembangan Kompetensi Teknis
	b. Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional
<b>18</b>	<b>Badan Keuangan &amp; Aset Daerah</b>
18.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
18.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
18.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>19</b>	<b>Dinas Komunikasi &amp; Informatika</b>
19.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
	a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
19.2	Program Aplikasi Informatika
	a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
19.3	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
19.4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>20</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran &amp; Penyelamatan Kota</b>
20.1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran & Penyelamatan Non Kebakaran
	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
<b>21-</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
21.1	Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
	a. Administrasi Tata Pemerintahan
	b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	c. Fasilitasi Koordinasi Hukum

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
	d. Fasilitasi Kerjasama Daerah
21.2	Program Perekonomian & Pembangunan
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	c. Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa
	d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
<b>22</b>	<b>Dinas Perpustakaan &amp; Kearsipan</b>
22.1	Program Pembinaan Perpustakaan
	a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.2	Program Pengelolaan Arsip
	a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
22.3	Program Perlindungan & Penyelamatan Arsip
	a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
22.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip
	a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
22.5	Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno
	a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
<b>23</b>	<b>Badan Perencanaan &amp; Pembangunan Daerah</b>
23.1	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
23.2	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan & Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>24</b>	<b>Inspektorat</b>
24.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
24.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	b. Pendampingan dan Asistensi
<b>25</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
25.1	Program Penanggulangan Bencana
	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
<b>26</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>
26.1	Program Penelitian & Pengembangan
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

No	Program dan Kegiatan
[1]	[2]
27	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>
27.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
27.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
27.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

**Sumber** : Bappeda Kota Medan

Dari Table 2.10. di atas tampak bahwa program/kegiatan organisasi pemerintah daerah relative telah mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja pada tahun 2022 serta dibandingkan dengan target RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari uraian di atas nampak bahwa adanya peningkatan kinerja Pemerintah Kota Medan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kota, yang ditunjukkan dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2022. Namun demikian masih perlu perhatian terhadap beberapa indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya mencapai target sehingga perlu didorong pencapaiannya agar lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teiknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- 8) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 9) Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
- 10) Permendikbud Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- 11) Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah;
- 12) Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 13) Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 14) Peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021;
- 15) Peraturan BKKBN Nomor 27 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
- 16) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- 21) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2022
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022

### **3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Medan**

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

#### **3.2.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat Maupun Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Memberikan Penugasan.**

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memberikan penugasan diantaranya adalah:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3) Kementerian Kesehatan, Bidang Keluarga Berencana. dan BKKBN Propinsi Sumatera Utara.
- 4) Kementerian Koperasi Dan UKM
- 5) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
- 6) Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian

#### **3.2.2. Bidang Urusan Yang Ditugas Pembantuan**

Kekhususan penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan adalah program, kegiatan, sumber pendanaan maupun prasarana dan sarana pendukungnya, ditetapkan oleh pemerintah sehingga pemerintah kota hanya merupakan unsur pelaksana berdasarkan pedoman, acuan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Medan selama tahun 2022 mendapat tugas pembantuan dari 5 (tiga) kementerian/ lembaga, yaitu:

- 1) Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan
- 2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 3) Tugas Pembantuan Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Penurunan Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
- 4) Tugas Pembantuan Urusan Koeprasi dan UKM
- 5) Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Dan Perikanan.

#### **3.2.3. Jumlah Kegiatan**

Program dan jumlah kegiatan tugas pembantuan untuk masing-masing urusan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan  
Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 6 (enam) kegiatan yaitu:
  1. Penyaluran Bantuan Operasional PAUD 619 Lembaga dan 2077 Peserta Didik

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Jumlah Lembaga 30 Paket A: 554 Paket B : 1351 Paket C : 2379
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket (Ruang dan perlengkapan )
  4. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket ( ruang dan perlengkapan )
  5. Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru )
  6. Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional
- 2) Tugas Pembantuan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu: Pengaspalan jalan
- 3) Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 16 (enam belas) kegiatan yaitu:
1. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ( DAK NON FISIK )
  2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal ( DAK NON FISIK )
  3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK )
  4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) ( DAK NON FISIK )
  5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK NON FISIK )
  6. Pengendalian Program KKBPK (DAK NON FISIK )
  7. Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)
  8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK )
  9. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP ) (DAK NON FISIK )
  10. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  11. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK )
  12. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK )
  13. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK NON FISIK)

14. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK)
15. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK FISIK)
16. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK FISIK)

4) Urusan Koperasi dan UKM

Jumlah kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ada sebanyak 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan (DAK Non Fisik Kegiatan Sosialisasi Koperasi Modern (DAK Non Fisik Tahun 2022)
2. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Informasi Bagi Koperasi di Kota Medan (DAK PK2UKM Tahun 2021)
3. Kegiatan Pelatihan Informasi Perpajakan bagi Koperasi di Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022)
4. Kegiatan Pelatihan Manajemen untuk Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2022)
5. Kegiatan Pelatihan Penerapan Sanksi dan Bantuan Perlindungan Hukum bagi Koperasi oleh Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (DAK Non Fisik Tahun 2022)
6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022)

5) Urusan Pertanian dan Perikanan

Jumlah kegiatan tugas Bantuan Dana APBD Propinsi Sumatera Utara di Kota Medan Tahun 2022 ada sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
2. Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi
3. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

4.2.4. Anggaran Tugas Pembantuan

1) Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 6 kegiatan adalah:

1. Penyaluran Bantuan Operasional PAUD 619 Lembaga dan 2077 Peserta Didik adalah sebesar Rp. 17.110.750.000
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Jumlah Lembaga 30 Paket A : 554 Paket B : 1351 Paket C : 2379 adalah sebesar Rp. 7.168.461.060
3. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket (Ruang dan perlengkapan ) adalah sebesar Rp. 1.668.050.000
4. Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket ( ruang dan perlengkapan ) adalah sebesar Rp. 3.597.012.000
5. Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru) adalah sebesar Rp. 195.562.461.500

6. Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional adalah sebesar Rp. 5.802.000.000
- 2) Urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk 1 kegiatan adalah sebesar Rp. 2.325.644.000,-
- 3) Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 11 kegiatan adalah:
1. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 4.375.000
  2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal ( DAK NON FISIK ) adalah sebesar Rp 25.000.000
  3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK ) adalah sebesar Rp 70.640.000
  4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 327.600.000
  5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK ( DAK NON FISIK ) adalah sebesar Rp 364.500.000
  6. Pengendalian Program KKBPK (DAK NON FISIK) Rp 40.000.000
  7. Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp724.800.000
  8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 51.750.000
  9. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 3.269.578.400
  10. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK ) adalah sebesar Rp 37.799.600
  11. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 414.000.000
  12. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS) (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 7.966.180.000
  13. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK NON FISIK) Rp 22.330.000
  14. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK) adalah sebesar Rp 103.200.000
  15. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK FISIK) adalah sebesar Rp 144.908.000
  16. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(DAK FISIK) adalah sebesar Rp 358.650.000
- 4) Urusan Koperasi dan UKM
- Jumlah anggaran tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan sebanyak 6 kegiatan adalah:

1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan (DAK Non Fisik Kegiatan Sosialisasi Koperasi Modern (DAK Non Fisik Tahun 2022) adalah sebesar Rp 72.722.500
  2. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Informasi Bagi Koperasi di Kota Medan (DAK PK2UKM Tahun 2021) adalah sebesar Rp 65.972.500
  3. Kegiatan Pelatihan Informasi Perpajakan bagi Koperasi di Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022) adalah sebesar Rp 65.972.500
  4. Kegiatan Pelatihan Manajemen untuk Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2022) adalah sebesar Rp 72.772.000
  5. Kegiatan Pelatihan Penerapan Sanksi dan Bantuan Perlindungan Hukum bagi Koperasi oleh Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (DAK Non Fisik Tahun 2022) adalah sebesar Rp 67.225.500
  6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022) adalah sebesar Rp 59.500.000
- 5) Urusan Pertanian dan Perikanan
- Jumlah anggaran tugas Bantuan Dana APBD Propinsi Sumatera Utara di Kota Medan Tahun 2022 untuk 4 (empat) kegiatan yakni
1. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp. 10.000.000
  2. Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi sebesar Rp.120.049.000
  3. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi sebesar Rp. 95.750.000
  4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.18.000.000

### **3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar pelaksanaan tugas pembantuan, program/kegiatan, lokasi, OPP Pelaksana, alokasi dan realisasi anggaran dan relaisasi capaian kerja yang menerima tugas pembantuan diuraikan berikut ini;

### 3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Medan

Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Kota Medan disajikan pada table 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut:

Tabel 3.1: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pengelolaan Pendidikan Usia Dini</b></li> <li>▪ Penyaluran Bantuan Operasional PAUD 619 Lembaga dan 2077 Peserta Didik</li> </ul>	Medan	Dinas Pendidikan	17.110.750.000	12.404.388.000	99.08	12.404.388.000	100	
									Tersalurkannya Bantuan Operasional Kelembaga PAUD 749 lembaga jumlah peserta Didik 2077 orang		

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan</b></li> <li>▪ Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Jumlah Lembaga 30 Paket A : 554 Paket B : 1351 Paket C : 2379</li> </ul>			7.168.461.060	7.168.461.060		7.168.461.060 Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Jumlah Lembaga 30 Paket A : 554 Paket B : 1351 Paket C : 2379	100	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b></li> <li>▪ Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,</li> </ul>			1.668.050.000	1.645.802.900	98.67	1.645.802.900	100	
									Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket ruang dan perlengkapan )						dengan jumlah 20 Paket ruang dan perlengkapan )		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>▪ Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket (ruang dan perlengkapan)</li> </ul>	Medan	Dinas Pendidikan	3.597.012.000	3.020.731.900	83.98	3.020.731.900	100	
									Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan jumlah 20 Paket (ruang dan perlengkapan)		

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENGUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
2	Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan	Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambah Penghasilan Guru PNS Daerah	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>▪ Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD ( Sertifikasi Guru )</li> <li>▪ Dana Tambah Penghasilan PNSD Fungsional</li> </ul>	Medan	Dinas Pendidikan	195.562.461.500	182.720.747.008	93	Tersalurkannya Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru)	100	
						5.802.000.000	2.740.400.000	47	Tersalurkannya Penghasilan PNSD Fungsional	100	

Tabel 3.2: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022

NO	Kementerian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2022 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  • <b>1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b>  • <b>1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan</b>  • Pengaspalan di Jl. M. Nawi Harahap Kec. Medan Amplas (Dana DAK)	Medan   Medan  Medan  Medan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	606.305.139.934  606.305.139.934  267.978.633.818  2.325.644.000	326.842.001.448  326.842.001.448  112.357.288.670  2.202.174.000	53,91  53,91  41,93  94,69	Tingkat Kemantapan Jalan Kota 91%   Terlaksananya Panjang Jalan yang Direhabilitasi 463.823 M  Terlaksananya Pengaspalan di Jl. M. Nawi Harahap Kec. Medan Amplas (Dana DAK)	94,03   22,21  100	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022									

Tabel 3.3: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	BKKBN PUSAT	1.Peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Medan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	5.330.043.000	4.608.126.010	86.46		91.66	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			832.115.000	794.371.410	95.46	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi,	100	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021	Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		
		2.Peraturan BKKBN Nomor 27 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			4.375.000	3.920.000	89.60	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	
		Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			25.000.000	24.714.475	98.86	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	
		2021	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar			70,640,000	70,640,000	100	Terlaksananya Dukungan media KIE dan Dukungan Manajemen	<b>100</b>	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Ruang Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)			327.000,000	327.000.000	100	Terlaksananya operasional pemuktahiran data oleh kader dan pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana oleh kader	100	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			364.500.000	328.511.935	90,13	Tersedianya operasional tenaga lini lapangan, operasional pembinaan kader dan operasional penyuluhan KB	100	
			Pengendalian Program KKBPK			40.000. 000	38.985. 000	97,46	Tersalurkannya Transport Petugas distribusi Alkon, BBBM	100	

NO	Kemertrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemertrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
									dan Makan Minum		
			<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			724.800.000	724.800.000	-	-	100	
			Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			724.800.000	724.800.000	-	-	100	
			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten</b>			3.359.128.000	2.675.254.600	79,64		100	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			51.750.000	7.200.000	13,91	Terlaksananya Pembangunan 2 balai dan Pengadaan kelengkapan untuk 2 balai		
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode			3,269,578,400	2.633.124.600	80,53		100	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP )								
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			37.799.600	34.930.000	92.41	Terbinanya Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (POKTAN) dan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan	100	
			<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>414.000.000</b>	<b>413.700.000</b>	<b>99,93</b>		<b>100</b>	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung			414.000.000	413.700.000	99.93	Terlaksananya Pelaksanaan dan	100	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			KB						Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Medan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	7.996.180,000	4.028.600.000	50.57	Pengadaan BKB KIT Stunting 13 Unit	100	
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</b>			7.996.180,000	4.028.600.000	50.57	Terlaksananya Operasional edukasi 1000 HPK bagi ibu dan keluarga dan operasional pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi Catin	100	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan			7.996.180,000	4.028.600.000	50.57	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana		

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)						(kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPP KS)		
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Kota Medan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	125.530.000	81.406.943	64.85			
			<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			125.530.000	81.406.943	64.85			
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK NON FISIK)			22.330.000	22.330.000	100	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga (DAK NON FISIK)	100	
			Pengolahan dan			103.200.000	59.076.943	57.25	Tersedianya		

NO	Kemestrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemestrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK)						Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK)		
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Kota Medan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	144.908.000	137.008.500	94.55		100	
			<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			144.908.000	137.008.500	94.55		100	
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			144.908.000	137.008.500	94.55	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100	
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Kota Medan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	358.650.000	327.657.750	91.36		100	

NO	Kemntrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kemntrian	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga</b>			358.650.000	327.657.750	91.36		100	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			358.650.000	327.657.750	91.36	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL ,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	100	

Tabel 3.4: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2021

No	Kemntrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementerian Koperasi Dan UKM	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2020, Tanggal 06 Februari 2020	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022)  Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pelatihan perkoperasian bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Medan selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta, dari tanggal 07 s/d 09 Juni 2022 di Hotel Putra Mulia Jalan Gatot Subroto Nomor 62 Medan, Sumatera Utara	Kota Medan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan	404.200.000	404.200.000	100		100	-
						72.722.500	72.722.500	100	Terlaksananya kegiatan pelatihan perkoperasian bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Medan selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta	100	-

No	Kemntrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			2. Kegiatan Sosialisasi Koperasi Modern (DAK Non Fisik Tahun 2022) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan sosialisasi koperasi modern selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 21 s/d 23 Juni 2022 di Hotel Putra Mulia Jalan Gatot Subroto Nomor 62 Medan, Sumatera Utara			65.972.500	65.972.500	100	Terlaksananya kegiatan sosialisasi koperasi modern selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta	100	-
			3. Kegiatan Pelatihan Informasi Perpajakan bagi Koperasi di Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pelatihan informasi perpajakan bagi koperasi di Kota Medan selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 11 s/d 13 Juli 2022 di Hotel Saka Jalan			65.972.500	65.972.500	100	Terlaksananya kegiatan pelatihan informasi perpajakan bagi koperasi di Kota Medan selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta,	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Gagak Hitam Nomor 14 Sei Sikambing B Medan, Sumatera Utara								
			4. Kegiatan Pelatihan Manajemen untuk Koperasi (DAK Non Fisik Tahun 2022) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen untuk koperasi selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta, dari tanggal 12 s/d 14 Juli 2022 di Hotel Saka Jalan Gagak Hitam Nomor 14 Sei Sikambing B Medan, Sumatera Utara			72.772.000	72.772.000	100	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen untuk koperasi selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta,	100	-
			5. Kegiatan Pelatihan Penerapan Sanksi dan Bantuan Perlindungan Hukum bagi Koperasi oleh Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (DAK Non Fisik Tahun			67.225.500	67.225.500	100	Terlaksananya kegiatan pelatihan penerapan sanksi dan bantuan perlindungan	100	-

No	Kemntrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			2022) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pelatihan penerapan sanksi dan bantuan perlindungan hukum bagi koperasi oleh badan pelauanan dan konsultasi hukum selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta dari tanggal 09 s/d 11 Agustus 2022 di Hotel Putra Mulia Jalan Gatot Subroto Nomor 62 Medan, Sumatera Utara						hukum bagi koperasi oleh badan pelauanan dan konsultasi hukum selama 3 hari yang diikuti 30 orang peserta		
			6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM Kota Medan (DAK Non Fisik Tahun 2022) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pendampingan oleh tenaga pendamping terhadap pelaku Koperasi dan UKM di Kota Medan selama 10 Bulan, mulai			59.500.000	59.500.000	100	Terlaksananya kegiatan pendampingan oleh tenaga pendamping terhadap pelaku Koperasi dan UKM di Kota Medan selama 10 Bulan	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			dari bulan Februari hingga bulan Nopember 2022.								

### 3.3.2. Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah

Adapun tugas pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada daerah disajikan pada table 4.4 berikut.

Tabel 3.6: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022

N O	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah NonKementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
<b>1</b>	<b>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultur a Propinsi Sumatera Utara</b>	1. Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 018.08.4.079132/20 22 tanggal 17 Januari 2022 dan POK Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 2. Sesuai surat dari Dinas Tanaman Pangan dan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian. Kegiatan : • Bimtek, Monitori ng dan Evaluasi kegiatan lingkup Alat dan Mesin Pertanian.	Kec. M. Labuhan, Kec. M. Tuntungan Kec. M. Johor, Kec. M. Selayang, Kec. M. Deli, Kec.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	10.000.000	10.000.000	100	Terlaksanan Mendata dan memonitoring pemanfaatan Alsintan di kelompok tani	100	

N O	Kementerian/ Lemabaga Pemerintah NonKementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 900/43.06/Keu/III/ 2022 tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Untuk Dana Tugas Pembantuan Sumber Dana Ditjen. PSP Kode Satker 079132 TA 2022 pada tanggal 7 Maret 2022 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan dengan Nomor: 800/1174/III/2022 tentang Penetapan Tim Pembina, Admin Updating e- RDKK DAN Tim Verifikasi dan Validasi Data Penerima Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</li> <li>- E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi</li> <li>- Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi</li> <li>• Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP</li> </ul>	M. Marelan, Kec. M. Sunggal, Kec. M. Polonia Kec. M. Helvetia							
			- E-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Kec. M. Labuhan, Kec. M. Tuntungan Kec. M. Johor, Kec. M. Selayang, Kec. M. Deli, Kec.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	120.490.00	111.538.900	92.91	Terlaksana penyesuaian dengan Kebutuhan dan penebusan pupuk, penyaluran dilakukan oleh distributor ke	100	

N O	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah NonKementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		Bersubsidi Kota Medan TA 2022.		M. Marelan, Kec. M. Sunggal, Kec. M. Polonia Kec. M. Helvetia					kios secara langsung		
		4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan Nomor: 800/449/1/2022 Tentang Penetapan Nama PPK, PK, BPP, Staf Pengelola Keuangan, Staf Penyusun Pelaporan Online, Petugas Input BAST Online dan pemanfaatan Alsintan dan Petugas Pemeriksa TA 2022	- Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Kec. M. Labuhan, Kec. M. Tuntungan Kec. M. Johor, Kec. M. Selayang, Kec. M. Deli, Kec. M. Marelan, Kec. M. Sunggal, Kec. M. Polonia Kec. M. Helvetia	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan	95.750.000	95.035.025	99.25	Terlaksananya Pengarahan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Pupuk dilapangan	100	
		5. SK Walikota Medan Nomor 520/06.K tentang Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan di kota medan tahun 2022 Tanggal 6 Juni	- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Kec. M. Labuhan, Kec. M. Tuntungan	Dinas Pertanian dan Perikanan	18.000.000	17.950.000	99.72	Terlaksananya Laporkan Hasil kegiatan kepada atasan	100	

N O	Kementerian/ Lemabaga Pemerintah NonKementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		2022	Ditjen PSP	Kec. M. Johor, Kec. M. Selayang, Kec. M. Deli, Kec. M. Marelan, Kec. M. Sunggal, Kec. M. Polonia Kec. M. Helvetia	Kota Medan				dan Dinas Tanamanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara		

### 1.3. **Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi berkaitan tugas pembantuan:

#### 1. **Urusan Pendidikan dan Kebudayaan**

##### **Hambatan/Permasalahan yang dihadapi**

- a. Pada Triwulan IV diharapkan tidak ada lagi muncul rekomendasi pembayaran Tunjangan sertifikasi untuk tenaga pendidikan untuk bulan Desember.
- b. Pada Bantuan BOP PAUD mengalami pengurangan dari jumlah anggaran sehingga berpengaruh kepada penyaluran dana ke lembaga PAUD.
- c. Perlu di tinjau jumlah Lembaga Taman Kanak-kanak yang masih minim dan perlu untuk di sesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada pada daerah yang padat.
- d. Dimohonkan untuk ditambah anggaran untuk TAMSIL tenaga pendidik karena kuota yang tentukan berdasarkan anggaran belum sesuai dengan data yang tersedia.
- e. Pembayaran yang dilakukan untuk Dana Tunjangan Sertifikasi diharapkan tidak menimbulkan pengalihan anggaran di tahun selanjutnya (carry over) sehingga tidak mengganggu pelaporan keuangan.

#### 2. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

##### **Permasalahan yang dihadapi**

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022 dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan

#### 3. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **Permasalahan yang dihadapi**

- Pembatasan kegiatan sosial dan physical distancing akibat pandemi covid 19 menyebabkan sebagian besar kegiatan BOKB yang sifatnya pertemuan tidak dapat dilaksanakan

#### 4. **Urusan Koperasi dan UKM.**

Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022 dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan

#### 5. **Urusan Pertanian dan Perikanan adalah:**

##### **Permasalahan yang dihadapi**

- a. Jumlah Wilayah Kecamatan Potensi di Kota Medan tidak sesuai dengan jumlah wilayah yang terdapat pada pagu anggaran
- b. Keterlambatannya Penyaluran Pupuk bersubsidi
- c. Kurangnya Jumlah Pupuk Bersubsidi di masing-masing Kecamatan.

### 1.4. **Saran dan Tindak Lanjut**

#### 1. **Urusan Pendidikan dan Kebudayaan adalah:**

- a. Melakukan pendataan jumlah tenaga pendidik yang sertifikasi guna peningkatan kebutuhan yang seharusnya dibayarkan.
- b. Dari hambatan dan permasalahan yang terjadi harus di evaluasi dan monitoring agar mendapat kebutuhan yang akurat terhadap anggaran yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi pembayaran yang tertunda.

#### 6. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

**Solusi yang diupayakan: -**

**7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:**

Solusi yang diupayakan

- Kegiatan tetap di laksanakan dengan mematuhi Protokol kesehatan, dan akan tetap di laksanakan tahun depan.

**8. Urusan Koperasi dan UKM adalah**

Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2022 dalam pelaksanaanya tidak mengalami hambatan

**9. Urusan Pertanian dan Perikanan adalah:**

Solusi yang diupayakan adalah

- a. Penyesuaian pagu anggaran dengan wilayah potensi sehingga tidak terjadi Sisa Pagu Anggaran (Silpa)
- b. Penyesuaian jadwal tanam dengan pendistribusian pupuk bersubsidi
- c. Perlunya penambahan Kuota Pupuk bersubsidi dan penambahan kios penyalur Pupuk bersubsidi di setiap Kecamatan

**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**4.1. Urusan Pendidikan**

**4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pendidikan merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar (SD, SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

**4.1.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Pendidikan

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			
	Tingkat partisipasi I warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	70,50%	71,31%	101,15%
2	<b>Pendidikan Dasar (SD, SMP)</b>			
2.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	99,85%	99,85%
2.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	78,26%	81,54%	104,19%
3	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	86,00%	99,85%	116,10%

#### 4.1.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Pendidikan (Rp)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			-	32,111,364,734	21,089,535,666	65.68
	a	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD K20220131030517		-	22,883,409,138	12,990,405,016	56,77
		1)	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik	362,884,600	358,668,145	98,83
		2)	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	739,384,238	735,009,871	99,41
		3)	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	4,662,283,000	4,622,283,000	99,14
		4)	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik	17,118,857,300	7,274,444,000	42,49
		5)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	0,00
		6)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0,00
	b	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K20220131030758		-	2,003,251,800	1,573,562,000	78,55
		1)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan	Kegiatan	0	0	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
		2)	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0,00
		3)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	617,360,800	187,671,000	30.40
		4)	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0.00
		5)	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	1,385,891,000	1,385,891,000	100.00
	c		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131030938	-	130,494,000	123,832,500	94.90
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0,00
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0,00
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0,00
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0,00
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0,00
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	130,494,000	123,832,500	94.90
	d		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456	-	7,094,209,796	6,401,736,150	90.24
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	2,220,959,796	1,528,486,150	68.82
		2)	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	4,873,250,000	4,873,250,000	100.00
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0,00
<b>2</b>	<b>Program Pendidikan Dasar</b>			-	<b>77,224,066,840</b>	<b>68,770,493,463</b>	<b>89.05</b>
	a		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/ Paket B) K20220131031634	-	50,116,835,660	44,030,835,660	87.86
		1)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	21,558,633,540	21,522,633,540	99.83
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	28,558,202,120	22,508,202,120	78.82
		3)	Penyediaan layanan	Peserta	0	0	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Didik			
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0,00
	b		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B) K20220131031749	-	3,391,637,266	2,381,744,875	70.22
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0,00
		2)	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	3,391,637,266	2,381,744,875	70.22
	c		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B) K20220131032010	-	20,938,777,864	20,376,425,864	97.31
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0,00
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	150,611,982	150,311,982	99.80
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	20,500,270,282	20,226,113,882	98.66
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1	Kegiatan	287,895,600	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			(satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				
	d		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032146	-	1,005,395,070	675,336,264	67.17
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	567,300,076	428,005,000	75.45
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	146,268,282	46,800,000	32.00
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0,00
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0,00
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0,00
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0,00
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	291,826,712	200,531,264	68.72
	e		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032556	-	1,771,420,980	1,306,150,800	73.73
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	311,538,100	182,470,800	58.57
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan	0	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tenaga Kependidikan			
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	1,459,882,880	1,123,680,000	76.97
<b>3</b>	<b>Program Pendidikan Kesetaraan</b>			-	<b>78,024,661,892</b>	<b>64,812,324,501</b>	<b>83.07</b>
	a	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K20220321023938		-	7,975,433,906	7,239,546,000	90.77
		1)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	729,212,846	22,886,000	3.14
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	7,168,461,060	7,162,460,000	99.92
		3)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	77,760,000	54,200,000	69.70
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0.00
	b	Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K20220321024011		-	1,447,586,300	1,154,819,800	79.78
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0.00
		2)	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	1,447,586,300	1,154,819,800	79.78
	c	Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K20220321024025		-	0	0	0.00
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada	Kegiatan	0	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0.00
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0.00
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0.00
	d		Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024044	-	425,934,000	244,711,500	57.45
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0.00
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	0	0.00
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0.00
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0.00
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan	Kegiatan	0	0	0.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Satuan	Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah				
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	142,387,400	104,311,500	73.26
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	283,546,600	140,400,000	49.52
	e		Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024123	-	68,175,707,686	56,173,247,201	82.39
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0.00
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67,618,787,686	55,848,167,001	82.59
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	556,920,000	325,080,200	58.37
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>JUMLAH</b>	-	<b>187,360,093,466</b>	<b>154,672,353,630</b>	<b>82.55</b>

#### 4.1.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.1.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pejabat Pimpinan Dinas	2	8
2	Pejabat Bidang Pendidikan PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	8	32
3	ASN Bidang PAUD & PNF serta Pendidikan Dasar	15	60
	<b>JUMLAH</b>	25	100

#### 4.1.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.1.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Belum tersedia anggaran untuk memberikan perlengkapan dasar Peserta Didik Kesetaraan	Pada APBD Tahun 2024, diusulkan kegiatan tersebut	Pendataan peserta didik Kesetaraan
2	Belum tersedia anggaran untuk Bea Siswa Peserta Didik PAUD	Pada APBD Tahun 2024, diusulkan kegiatan tersebut	Pendataan peserta didik di PAUD

## 4.2. Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh OPD Dinas Kesehatan Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

#### 4.2.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.959	34.658	91,30%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.234	34.285	94,62%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.508	34.285	99,35 %
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	166.943	140.935	84,42%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	354.866	168.653	47,52%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	1.817.252	69.387	3,82%
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	203.974	160.345	78,61%
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	457.947	26.176	5,71%
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	40.609	8.902	21,92%
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	3.264	2.281	69,88%
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	92.282	26.049	28,22%
12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV	73.111	24.470	33,46%

#### 4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Kesehatan (Rp)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			4.597.848.889	2.679.021.100	58,27
	a	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota		4.597.848.889	2.679.021.100	58,27
		1)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.291.561.420	918.767.300	71,14
		2)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	542.575.779	128.235.100	23,64
		3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	0,00
		4)	Pelayanan Kesehatan Balita	840.039.000	374.944.600	44,63
		5)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	0,00
		6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.004.366.920	604.816.100	60,22
		7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	349.400.000	274.700.000	78,62
		8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.250.000	30.750.000	84,83
		9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	0,00
		10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	-	0,00
		11)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	329.900.000	216.950.000	65,76
		12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	153.755.770	129.840.000	84,45
		13)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	0,00
		14)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	0,00

#### 4.2.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu 1.864 personil. Personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

Tabel 4.2.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Analisis Kesehatan	1
2	Apoteker	51
3	Asisten Apoteker	100
4	Bidan	453
5	Dokter	315
6	Dokter Gigi	129
7	Dokter Spesialis	6
8	Fisioterapi	3
9	Keterampilan Fisik	1
10	Nutrisi	75
11	Perawat	532
12	Pembantu Perawat	5
13	Perawat Gigi	78
14	Perekam Medis	74
15	Radiografer	3
16	Refraksinis Opt.	2
17	Sanitarian	36
<b>Total</b>		<b>1.864</b>

#### 4.2.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dilakukan antara lain meliputi :

Tabel 4.2.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih kurangnya pemahaman petugas kesehatan di tingkat Puskesmas terkait Definisi Oprasional (DO) Indikator SPM sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam perekapan data indikator sesuai standar.	Memberikan pelatihan/Workshop bagi petugas Puskesmas terkait DO Indikator SPM.
2	Masih ditemukan adanya petugas kesehatan yang masih harus bertugas sebagai tenaga administrasi yang menyebabkan terkendalanya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal	Menempatkan petugas kesehatan di tingkat Puskesmas sesuai tupoksi dan latar belakang pendidikan.
3	Masih ditemukan adanya petugas yang harus menjadi penanggungjawab beberapa program (lebih dari satu program) di tingkat Puskesmas sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan.	Membentuk Tim SPM untuk tingkat Puskesmas.
4	Masing kurangnya pemahaman pengelola program dan Puskesmas dalam penganggaran pencapaian SPM yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 dan Permendagri No 59 Tahun 2021.	Memberikan pelatihan/workshop dan pendampingan dalam hal perencanaan dan penganggaran pencapaian SPM.

5	Belum ada penetapan data sasaran dari Kota Medan untuk bisa digunakan sebagai data sasaran SPM, sehingga masih menggunakan data sasaran dari Pusdatin yang tidak sesuai dengan kondisi di Puskesmas.	Memberi usulan melalui Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan untuk penetapan data sasaran Kota Medan yang sesuai dengan kondisi di Kota Medan.
---	--	--

### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

#### 4.3.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rumah Tangga/Warga yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	2.460.858	1.817.199	73,84%
2	Rumah Tangga/KK yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak	564.619	30.784	5,45%

#### 4.3.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKP, CK, TR) Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana	Realisasi	Serapan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM</b>			<b>17.150.000.000</b>	<b>15.980.870.000</b>	<b>93,18</b>
	a		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kab./Kota	17.150.000.000	15.980.870.000	93,18
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	200.000.000	198.822.000	99,41
		2)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	16.950.000	15.782.048	93,11
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			<b>14.552.000.000</b>	<b>10.290.385.500</b>	<b>70,71</b>
	a		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab./Kota	14.552.000.000	10.290.385.500	70,71
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	200.000.000	97.624.500	48,81
		2)	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem	100.000.000	0	0,00
		3)	Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala	7.952.000.000	5.404.195.000	67,96
		4)	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	6.200.000.000	4.778.566.00	77,23
		5)	Sosialisasi & pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	100.000.000	0	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Jumlah</b>		<b>31.702.000.000</b>	<b>26.271.255.500</b>	<b>82,87</b>

#### 4.3.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKP,CK,TR) Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.3.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Pekerjaan Umum

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Personil Dinas PKP, CK, TR	84	100
2	Personil Berkaitan Penerapan SPM	25	29,76

#### 4.3.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

No	Permasalahan	No	Solusi
1	Adanya perubahan daftar calon penerima manfaat pada saat survei dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi perubahan DED	1	Perlunya pendataan yang akurat mengenai daftar calon penerima manfaat air bersih dan air limbah
2	Data perhitungan kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih dari PAM tidak akurat	2	Diadakan perhitungan kembali dengan pihak PAM terkait kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih
3	Jumlah dana yang dianggarkan pada APBD Kota Medan belum mencukupi untuk melayani jumlah sambungan rumah yang di akomodir	3	Perlu adanya dana bantuan dari berbagai stake holder terkait
4	Adanya beberapa calon penerima manfaat yang menolak pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah	4	Sosialisasi terhadap beberapa calon penerima manfaat sambungan rumah air limbah mengenai pentingnya pemasangan sambungan air limbah agar tidak terjadi penolakan

#### 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### 4.4.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0%	0%
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	0%	0%

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas merupakan indikator baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

#### 4.4.3. Alokasi Anggaran

Anggaran terkait pelaksanaan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.3. Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Alokasi Anggaran Berkaitan Penerapan SPM	Jumlah (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>100.000.000,-</b>
1.1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program kabupaten/kota	100.000.000,-
1.1.2	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	0
<b>1.2</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>396.183.417.050,-</b>
1.2.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	396.183.417.050,-
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	396.183.417.050,-

#### 4.4.4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi Perangkat Daerah, dengan jumlah personil 84 orang yang rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.4.4-1. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Perumahan Rakyat

No	Bidang Tugas	Eselon			Staff	Jab. Fungsional	Jumlah	Ket
		II	III	IV				
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	1	2	19	1	23	-
3	Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah	-	-	-	22	3	25	-
4	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	-	1	-	13	4	18	-
5	Bid. Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	1	-	10	3	14	-
6	UPT Pengelola Rusun Sederhana Sewa Kayu Putih	-	-	1	-	-	1	-
7	UPT Pengelola Rusun Sederhana Sewa Kayu Seruai	-	-	2	-	-	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>-</b>

Tabel 4.4.4-2. Personil/Pegawai Sesuai Jabatan Urusan Perumahan Rakyat

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	II/b	1	-
2	Sekretaris	III/a	1	-
3	Kepala Bidang	III/b	3	-
4	Kasi/Kasubbag	IV/a	2	-
5	Kepala UPT	IV/a	1	-
6	Kasubbag TU	IV/b	2	-
7	Sub Koordinator	Pejabat Fungsional	10	-

#### 4.4.5. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terkait implementasi kebijakan SPM dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

No	Masalah	Solusi	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan Berkas / surat tanah pembebasan lahan bermasalah dan perlu di update</li> <li>Masih ada pemilik lahan tidak sepakat secara pembayaran bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemko Medan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan pendekatan terhadap pemilik lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemko Medan agar dapat sepakat secara pembayaran</li> <li>Berkas/ surat yang diperlukan untuk pembebasan lahan dapat dilengkapi/ di update</li> </ul>	Pendataan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan

#### 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

##### 4.5.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.5.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
<b>A</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)</b>			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%
<b>B</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>			
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	0%	0%
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	-	-	-
2.1	Banjir	100%	0,15%	0,15%
2.2	Angin Putting Beliung	100%	0,10%	0,10%
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	0%	0%
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	0%	0%
5	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	0,11%	0,11%
6	Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	0,11%	0,11%
7	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	0,78%	0,78%

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
8	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	33,03%	33,03%
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	0%	0%
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	0%	0%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	15,18%	15,18%
<b>C</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota (DPK-PK)</b>			
1	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	100%	78,90%	78,90%
2	Waktu tanggap ( <i>respons time</i> ) penanganan kebakaran (menit)	15,00	11,48	130,66%

#### 4.5.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Rp)

No	Anggaran Terkait Penerapan SPM	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)</b>		
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>34.746.452.286</b>	<b>33.043.445.190</b>
1.1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.779.298.760	31642.142.778
1.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.907.153.526	1.401.302.412
1.3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	60.000.000	-
<b>B</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>		
<b>1</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.686.083.808</b>	<b>9.919.718.335</b>
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	813.005.000	765.901.100
1.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	348.200.000	342.081.100
1.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	464.805.000	423.820.000
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.261.273.808	6.703.550.890
1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	298.200.000	291.734.100
1.2.2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	0	0
1.2.3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	146.466.000	145.566.000

No	Anggaran Terkait Penerapan SPM	Anggaran	Realisasi
1.2.4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	134.060.000	103.076.000
1.2.5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1.131.118.460	1.045.817.200
1.2.6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.448.646.720	2.258.861.000
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.611.805.000	2.450.266.345
1.3.1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0
1.3.2	Respon cepat darurat bencana	1.458.126.200	1.388.860.145
1.3.3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0
1.3.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/kota	1.063.678.800	1.061.406.200
<b>C</b>	<b>Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K)</b>		
<b>1</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran</b>	<b>12.494.040.280</b>	<b>11.807.679.374</b>
1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.297.940.280	11.615.769.437
1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	196.100.000	191.909.937

#### 4.5.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.5.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Persen
<b>1</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)</b>		
<b>1.1</b>	<b>Personil Satpol-PP</b>	<b>691</b>	<b>100</b>
a	PNS	66	
b	Non PNS/PHL	625	
<b>2</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>		
<b>2.1</b>	<b>Personil BPBD</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
a	PNS	32	
b	PHL	65	
<b>3</b>	<b>Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran</b>		
<b>3.1</b>	<b>Personil DP2K</b>	<b>303</b>	<b>100</b>
a	PNS	153	
b	Non PNS	150	

#### 4.5.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas terkait menangani urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini

Tabel 4.5.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

<b>A Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)</b>		
<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>
1	Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol-PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2	Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan pelayanan dasar.	Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3	Sarana & Prasarana Satpol-PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana & prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019) antara lain: Luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga dan Latihan Satpol PP yang kurang memadai.	Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4	Anggota Satpol-PP Kota Medan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 7 orang dan anggota Satpol-PP Kota Medan yang berkualitas PPNS ada 8 orang.	Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data
<b>B Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)</b>		
<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>
1	Kurangnya Dukungan Personil dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Penambahan Personil yang memiliki Skill/Kemampuan
2	Kurangnya Pemahaman Aparatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Sosialisasi dan bimbingan teknis SPM kepada OPD yang memiliki SPM
3	Gudang yang Kurang Memadai untuk Logistik Bencana dan Bahan Kontruksi Bencana	Pembangunan Gedung untuk mendukung Penyimpanan Logistik Bencana dan Bahan Kontruksi Bencana
4	Kurangnya Anggaran Pendukung Pelaksanaan SPM, sehingga Capaian SPM belum Optimal	Dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan, ada penambahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>C Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakarab (DP2K)</b>		
<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>
1	Relative belum terlindunginya seluruh wilayah Kota Medan dari bahaya kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pos pemadam kebakaran yaitu 5 Pos. Berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kota Medan, dibutuhkan 13 lokasi Pos pemadam kebakaran.	Memasukkan rencana penambahan pos pemadam kebakaran dalam rencana strategis (Renstra) dengan harapan pada tahun 2026 jumlah pos pemadam kebakaran menjadi 9 lokasi sehingga pencapaian SPM dapat lebih baik lagi.

## 4.6. Urusan Sosial

### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Urusan Sosial merupakan salah satu urusan yang termasuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemko Medan. Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial berkaitan dengan beberapa indikator meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

### 4.6.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Realisasi merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.6.2. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5,932 orang	5.124 orang	86,38%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	12.046 orang	12.046 orang	100%

### 4.6.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang sosial terutama berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.3. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Program/Kegiatan Berkaitan Penerapan SPM	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.409.516.300</b>
1.1	Pemberian alat bantu bagi orang dengan kecatatan	1.201.710.000
1.2.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	1.592.721.000
1.3.	Pemberian bimbingan fisik , mental, spiritual dan sosial	1.615.085.300
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>3.325.567.521</b>
2.1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kab/ kota	2.471.100.921

No	Program/Kegiatan Berkaitan Penerapan SPM	Jumlah (Rp)
2.2	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/ kota	854.466.600
<b>Jumlah</b>		<b>7.735.083.821</b>

#### 4.6.4. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan SPM yang telah ditetapkan maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kota Medan didukung oleh ketersediaan aparatur Sumber Daya Manusia yaitu :

Tabel 4.6.4. Personil/Pegawai Sesuai Bidang Tugas Urusan Sosial

No	Keterangan	Jumlah (orang)	
		PNS	Non PNS
<b>1</b>	<b>Pegawai Dinas Sosial</b>		
1.1	ASN	44	
1.2	PHL		53
1.3	PKH		175
1.4	TKSK		21
1.5	PEKSOS		3
1.6	Pendamping Lansia		10
1.7	Pendamping Disabilitas		8
1.8	TAGANA		40
<b>2</b>	<b>Pegawai Berkaitan Penerapan SPM</b>		<b>106</b>
2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti		36
2.1.1	JRC		15
2.1.2	PEKSOS		3
2.1.3	Pendamping Lansia		10
2.1.4	Pendamping Disabilitas		8
2.2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial/ TAGANA		40

#### 4.6.5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.5. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

No	Permasalahan	No	Solusi
1	Rumah Perlindungan Sosial Masih dalam tahap pembangunan	1	Diperkirakan selesai pada tahun 2024
2	Penyajian data terkait SPM lansia , disabilitas , anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang belum valid	2	Melakukan verifikasi data terkait PPKS kategori terlantar
3	Kurangnya SDM Potensial dan personil dilapangandalamrangkapenertiban PMKS	3	Menambah ASN yang potensial dan personil lapangan lainnya dalam rangka penertiban PPKS

## BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun 2022 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menyajikan berdasarkan prinsip: transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota selama tahun anggaran 2022 dengan situasi dan kondisi yang cukup dinamis. Di samping itu, penyusunannya juga merupakan implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan di masa yang akan datang, guna memperkuat implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022, pada dasarnya menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup; (i) capaian kinerja makro; (ii) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (iii) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa capaian kinerja makro pembangunan kota relatif cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin membaiknya berbagai indikator kinerja makro selama tahun 2022, seperti: Indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan.

Demikian juga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup: indikator kinerja kunci keluaran atau output, indikator kinerja hasil atau outcome dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dikatakan relatif cukup berhasil. Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditandai dengan membaiknya berbagai Indikator Kinerja Kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja tersebut merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota secara konsisten dan berkelanjutan serta kontribusi dari pemangku kepentingan dalam membangun Kota Medan.

Di samping keberhasilan tersebut, tidak dapat dipungkiri masih terdapat capaian kinerja yang secara relatif kurang menggembirakan seperti terlihat pada angka

pengangguran yang secara relatif belum dapat sepenuhnya diturunkan secara signifikan. Hal tersebut tentunya tidak disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Kota dalam mengatasinya, tetapi lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya pembangunan yang tersedia yang dapat dikelola selama tahun anggaran 2022

Pemerintah Kota juga menyadari selain tantangan yang disebutkan di atas, masih terdapat kekurangan dan kendala selama periode tahun anggaran 2022 terutama dalam pelaksanaan asas-asas *good governance* melalui *monitoring* dan evaluasi secara terus menerus. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Medan tidak menutup diri terhadap saran dan kritik yang konstruktif dalam membuat Kota Medan menjadi "*Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif*".

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan pembangunan kota yang secara nyata telah berkontribusi besar terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan selama tahun anggaran 2022, termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Pusat atas dukungan terhadap pembangunan kota selama ini.

*Sekian dan terima kasih.*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



**#KOLABORASI  
#MEDAN BERKAH**

